

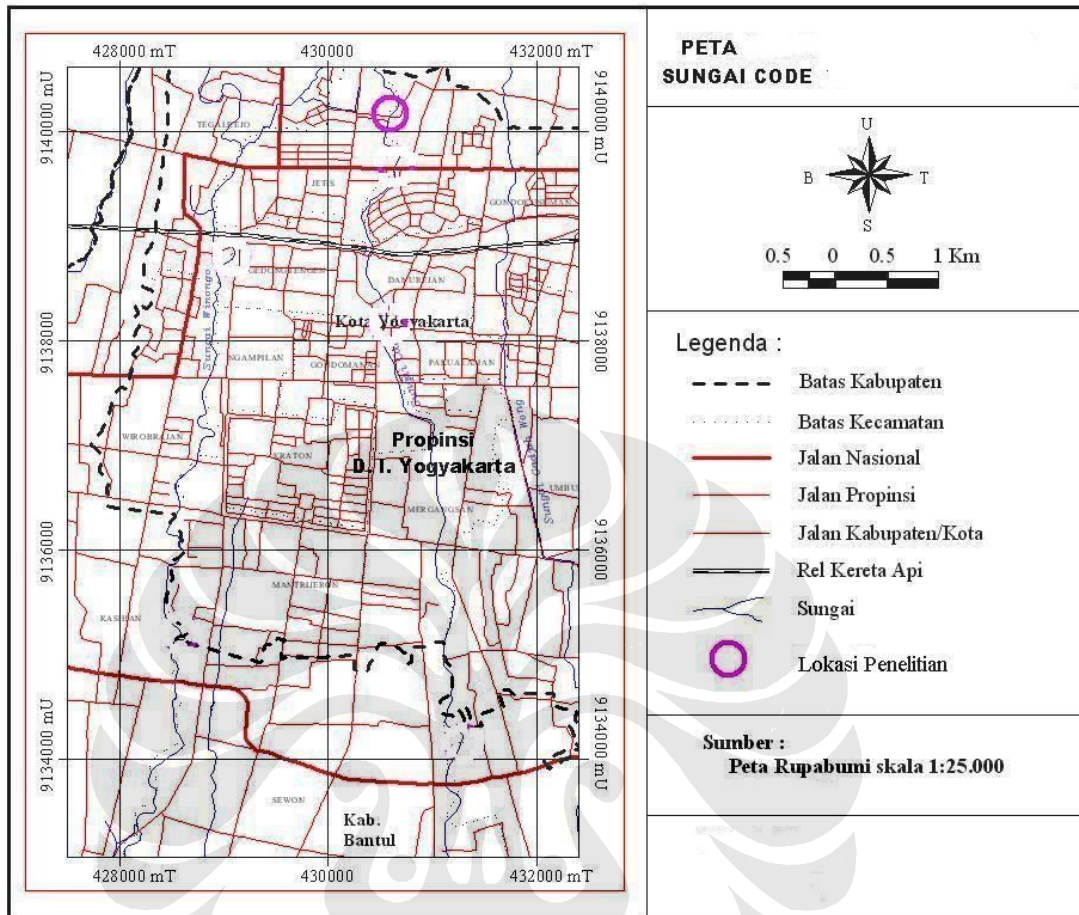
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Masyarakat Kawasan Code Utara

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kawasan Code Utara

Sungai Code adalah salah satu wilayah penting bagi perkembangan Kota Yogyakarta. Sungai yang membelah Kota Yogyakarta ini juga menjadi salah satu tujuan masyarakat pendatang untuk mendirikan permukiman baru. Kawasan Code Utara termasuk salah satu kawasan permukiman yang padat karena letak geografisnya berada di Kotamadya Yogyakarta dan berada tidak jauh dari pusat keramaian kota. Perkembangan penduduk akan selalu mengikuti kondisi sosial politik yang ada. Perkembangan Kawasan Code Utara sebagai permukiman bisa dilihat ketika Keraton menetapkan Kampung Jetisharjo sebagai wilayah permukiman pada tahun 1916 (Suryo, 2004). Penetapan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat di wilayah Kampung Jetisharjo yang telah berkembang menjadi salah satu penyedia sayuran di Pasar Kranggan. Kampung Jetisharjo saat itu dikenal dengan nama *Jetis Ledhok* Sayuran sementara Kampung Terban belum berpenghuni karena merupakan kawasan pemakaman Cina yang dikenal dengan “bong” (Surjomihardjo, 2000).

Perkembangan kota ke arah utara semakin cepat sejak berdirinya gedung Balairung UGM pada tanggal 19 Desember 1959. Kemudian terjadi pemindahan fakultas-fakultas dari lokasi di sekitar Keraton ke kawasan UGM yang baru di utara Yogyakarta. Kawasan UGM baru ini berhimpit dengan sisi timur sungai Code bahkan perumahan dosen berada di Kampung Sendowo merupakan daerah sempadan sungai Code. Kampung di sekitar Sungai Code mulai ramai setelah jembatan Sardjito dibangun pada tahun 1984.



Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian di Kotamadya Yogyakarta

Lokasi Penelitian berada di batas utara kota Yogyakarta yaitu Kampung Jetisharjo dan Kampung Terban (Gambar 4). Kampung Jetisharjo termasuk dalam Kawasan Code Utara. Kawasan ini sebelah barat dibatasi oleh jalan A.M Sangaji dan sebelah timur dibatasi oleh Jalan Prof Dr. Sardjito. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman. Luas wilayah Kampung Jetisharjo sebesar 5,04 ha dengan batas utara adalah Kecamatan Mlati (termasuk dalam Kabupaten Sleman), batas sebelah timur adalah Sungai Code, batas sebelah selatan adalah Kampung Jetis Pasiraman, dan batas sebelah utara adalah Kampung Blunyah (termasuk dalam Kelurahan Cokrodiningratan). Sementara itu luas wilayah Kampung Terban adalah 0,27 ha dengan batas utaranya adalah Kampung Sendowo (termasuk dalam Kabupaten Sleman), sebelah timur adalah Kelurahan Klitren, sebelah selatan adalah Kelurahan Kota Baru

serta sebelah barat adalah Sungai Code. Kampung Terban mempunyai wilayah yang sempit karena kawasan ini berada di sisi timur Sungai Code yang berbatasan langsung dengan kawasan Universitas Gadjah Mada yang berada di wilayah Kabupaten Sleman (gambar 5).



- = Lingkaran Biru kawasan permukiman kampung Jetisharjo
- = Lingkaran Merah kawasan permukiman kampung Terban
- = Kawasan UGM
- = Pemukiman Dosen UGM

Gambar 5. Sungai Code dan permukiman di sempadan Sungai Code Non Skala

4.1.2. Penduduk di Kawasan Code Utara

Kedua kampung ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yang diukur dengan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berdasarkan survei kampung pada tahun 2006, tingkat kepadatan Kawasan Code Utara cukup tinggi. Wilayah seluas 5,31 Ha ini didiami oleh 3.229 orang penduduk. Jumlah penduduk di Kampung Jetisharjo berjumlah 2.965 sedangkan di Kampung Terban hanya 264 orang. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup seimbang. Kepadatan penduduk disebabkan oleh banyaknya rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga. Banyak warga yang setelah menikah tidak tinggal terpisah namun tetap hidup bersama dengan orang tuanya. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang (Tabel 2). Beberapa rumah menyewakan kamar atau sebagian ruangnya. Kamar-kamar ini disewakan tidak hanya pada orang yang masih lajang namun juga pada keluarga.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Code Utara

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase
Laki-laki	1621	51%
Perempuan	1608	49%
Jumlah	3229	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Dari segi struktur umur penduduk, terlihat bahwa sebagian besar penduduk (70,52 %) yang tinggal di Kawasan Code Utara adalah penduduk usia produktif (tabel 3). Sedangkan persentase penduduk usia balita 4,27 %, usia sekolah 13,19 %, dan lanjut usia 12,02 %. Kelompok usia produktif cukup dominan di wilayah ini. Kondisi ini menyebabkan munculnya kerawanan sosial khususnya di kalangan usia muda yang sering mengisi waktu luang dengan berkumpul di ruang publik yang tersisa atau di beberapa rumah. Perjudian, minuman keras sampai narkoba dan perkelahian antar kelompok pemuda sering terjadi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Code Utara

Kelompok Umur (tahun)	Jumah Penduduk (orang)	Persentase
0 – 4	138	4.27
5 – 14	426	13.19
15 – 59	2277	70.52
60+	388	12.02
Jumlah	3229	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Kelompok umur dewasa mempunyai beberapa kegiatan yang sering dilakukan bersama, seperti karawitan dan macapatan. Ada juga yang mengisi waktu luang dengan membuat kelompok-kelompok musik dan berlatih di salah satu beranda rumah warga. Kegiatan berdasar kelompok umur ini juga terbagi di tempat peribadatan seperti remaja masjid atau muda-mudi Katholik (Mudika) dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.

Berdasarkan kelompok agama yang dianut, sebagian besar penduduk menganut agama Islam yaitu sebesar 84,42 % (tabel 4). Kelompok ini cukup aktif dalam kelompok-kelompok pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Beberapa musholla dan masjid di tengah permukiman penduduk cukup aktif mengadakan Taman Pendidikan Al Qur'an untuk anak-anak di sore hari serta pengajian rutin untuk orang dewasa.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Code Utara

Agama	Jumah Penduduk	Persentase
Islam	2726	84.42
Kristen	231	7.15
Katolik	264	8.18
Hindu	8	0.25
Budha	0	0.00
Aliran Kepercayaan	0	0.00
Jumlah	3229	100.00

Sumber :Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Tingkat pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengetahui kualitas penduduk. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk Kawasan Code Utara berpendidikan SLTP yaitu sebesar 29,61 %, sedangkan yang menyelesaikan SLTA hanya 3,59%. Sementara itu sebagian besar penduduk di kawasan ini berpendidikan SLTP atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali (tabel 5).

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Code Utara

Tingkat Pendidikan	Jumah Penduduk (orang)	Persentase
Belum Sekolah	221	6.84
Tidak Sekolah	287	8.89
Tidak Tamat SD	595	18.43
Tamat SD	767	23.75
Tamat SLTP	956	29.61
Tamat SLTA	116	3.59
Akademi/Universitas	287	8.89
Jumlah	3229	100.00

Sumber : DataFMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat karena susah mendapatkan pekerjaan dan mengisi waktu sehari-hari. Banyaknya waktu luang ini sering menimbulkan perkelahian antar pemuda karena persoalan-persoalan kecil saja.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kegiatan Utama di Code Utara

Kegiatan Utama	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase
Bekerja	1178	45.48
Mengurus RT	402	15.52
Pensiun	165	6.37
Lansia	302	11.66
Mencari Pekerjaan/Menganggur	543	20.97
Jumlah	2590	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Penduduk Kawasan Code Utara sebagian besar mengaku bekerja (tabel 6), sementara sisanya mengurus rumah tangga (15,52 %), pensiunan (6,37 %), lansia (11,66 %) dan

menganggur (20,97 %). Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, yang bersifat sangat dinamis. Orang dapat bekerja dan berhenti bekerja kapan saja. Pembagian kegiatan penduduk dalam kelompok bekerja atau tidak bekerja ini tidak mudah karena banyak pekerjaan sektor informal yang dikerjakan di rumah. Akibatnya banyak warga Kawasan Code Utara bisa ditemui di rumahnya sehari-hari. Angka pengangguran atau sedang mencari pekerjaan menduduki urutan kedua dari tabel pengelompokan penduduk berdasarkan kegiatan utama, yaitu mencapai 20,97 %. Tingginya angka pengangguran ini meningkatkan potensi terjadinya perselisihan antar warga.

Penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta seperti petugas kebersihan, pelayan toko, serta usaha-usaha lain yang banyak terdapat di pusat perekonomian di Jalan Malioboro dan Jalan Solo sebanyak 54,22 %. Sisanya bekerja sebagai tukang bangunan, buruh, tukang becak, pedagang, penjahit, penjual koran, tukang potong rambut, yang mencapai 23,9 % (tabel 7).

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Code Utara

Jenis Pekerjaan	Jumah Penduduk (orang)	Persentase
PNS/TNI/POLRI	198	19.88
Guru/Dosen	24	2.41
Swasta/karyawan	540	54.22
Dagang	97	9.74
Bakul	28	2.81
Tukang Batu/Kayu	15	1.50
Tukang Becak	32	3.21
Buruh Tukang	41	4.12
Penjahit	14	1.41
Tukang Potong Rambut	7	0.70
Jumlah	996	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Pekerjaan di sektor informal ini cukup beragam. Salah satu kelompok pekerja sektor informal yang ada beroperasi di bawah Jembatan Sardjito. Di sana dapat ditemui kesibukan sekelompok pemuda yang memanfaatkan ruang tersisa untuk membuat

berbagai kerajinan dan cinderamata. Hasil kerajinan ini dipasarkan berdasarkan pesanan dari orang yang membutuhkan untuk pesta pernikahan dan wisuda, seperti pigura maupun plakat dan simbol-simbol berbagai perguruan tinggi banyak terdapat di Yogyakarta, sementara sisanya dijual di sepanjang Jalan Malioboro.

Salah seorang yang bekerja di sektor informal adalah Bapak Agus yang sekaligus menjadi ketua RT 12. Rumah Bapak Agus berada tidak jauh dari jalan setapak yang membatasi rumah warga dengan sempadan Sungai Code. Kegiatan yang dilakukannya sehari-hari adalah membuka reparasi sepeda motor di depan rumahnya. Tidak ada ruang khusus apalagi papan reklame atau papan pengumuman. Meskipun demikian banyak pemilik sepeda motor yang mempercayakan perbaikan motor kepadanya. Para pelanggan didominasi oleh kaum muda yang ingin memodifikasi motornya agar dapat dipacu lebih kencang.

Tingkat kepadatan bangunan hunian digambarkan dengan pemanfaatan ruang berupa bangunan horisontal yang dinyatakan dalam persen (%). Kepadatan bangunan di lingkungan permukiman Kawasan Code Utara termasuk tinggi. Artinya, hampir keseluruhan bentang lahan yang tersedia habis untuk bangunan. Hanya sebagian kecil ruang saja yang tersedia untuk infrastruktur publik seperti jalan kampung. Kondisi jalan kampung yang ada pun beragam, dari jalan lebar yang bisa dilalui mobil, jalan sedang yang bisa dilalui sepeda motor, sampai jalan sempit yang hanya bisa dilalui pejalan kaki.

Kawasan Code Utara telah memiliki akses jalan masuk dengan kondisi konstruksi bervariasi. Ditinjau dari konstruksi saat ini, jalan lingkungan dan jalan setapak di lokasi perencanaan dapat dibedakan menjadi : (1) Jalan dengan perkerasan aspal, yang dibangun dengan dana dari pemerintah Kotamadya Yogyakarta dan bisa dilalui oleh kendaraan roda empat tetapi hanya cukup satu kendaraan saja; (2) Jalan dengan perkerasan *conblock*, yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan juga ada beberapa ruas jalan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah kota dan propinsi; (3)

Jalan dengan perkerasan batu candi, yang biasanya terdapat di lokasi yang relatif curam sehingga jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor karena posisinya yang berundak; (4) Jalan dengan perkerasan rabat beton pasangan yang mendapatkan bantuan dari dinas Pekerjaan Umum ketika ada perbaikan Sungai Code; (5) Jalan dengan perkerasan beton (plat tutup saluran drainase); (6) Jalan tanah yaitu jalan yang berupa lorong-lorong kecil antar rumah yang memang diperuntukan sebagai jalan dengan kesepakatan antar warga dan pemilik rumah sebelah kiri dan kanan jalan.

Tabel 8. Panjang Jalan di Kawasan Code Utara

Kondisi Jalan	Panjang (M)	Persentase
Jalan aspal	350	6.00
Jalan Conblok	4881	83.74
Jalan Batu/tanah	598	10.26
Jumlah	5829	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Jalan Aspal sebanyak 6% terutama berada di jalur-jalur utama yang berhubungan dengan jalan besar (tabel 8). Jalan aspal hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda dua. Jalan conblok merupakan hasil gotong royong warga secara swadaya untuk membangun jalan yang lebih baik karena apabila musim penghujan, jalan-jalan tanah sangat becek dan sering terjadi longsor.

Masyarakat Kawasan Code Utara sebagian besar telah menggunakan listrik yaitu sebesar 99,86 %. Jumlah masyarakat yang memiliki sambungan langsung dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar 75,86 %. Sementara itu 8,29 % mengambil listrik dari tetangga dan 15,71 % menumpang (tabel 9). Ada perbedaan antara menyalur listrik dari tetangga dengan menumpang. Menyalur listrik dari tetangga artinya ikut membayar listrik setiap bulannya sesuai beban yang ada kemudian dibagi dua atau melalui kesepakatan bersama dengan menentukan beban yang harus ditanggung oleh penerima saluran listrik tersebut kepada pemilik meteran. Para penyalur listrik ini biasanya juga

memakai listrik cukup besar seperti untuk menyetrika dan menhidupkan televisi. Sementara itu masyarakat yang menumpang hanya dibantu oleh tetangga sebelahnya dengan beberapa titik lampu saja dan tidak dikenakan biaya.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Penerangan di Kawasan Code Utara

Sarana Penerangan	Jumah KK	Persentase
Listrik	531	75.86
Menyalur Listrik Tetangga	58	8.29
Lampu Minyak	1	0.14
Menumpang	110	15.71
Jumlah	3229	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

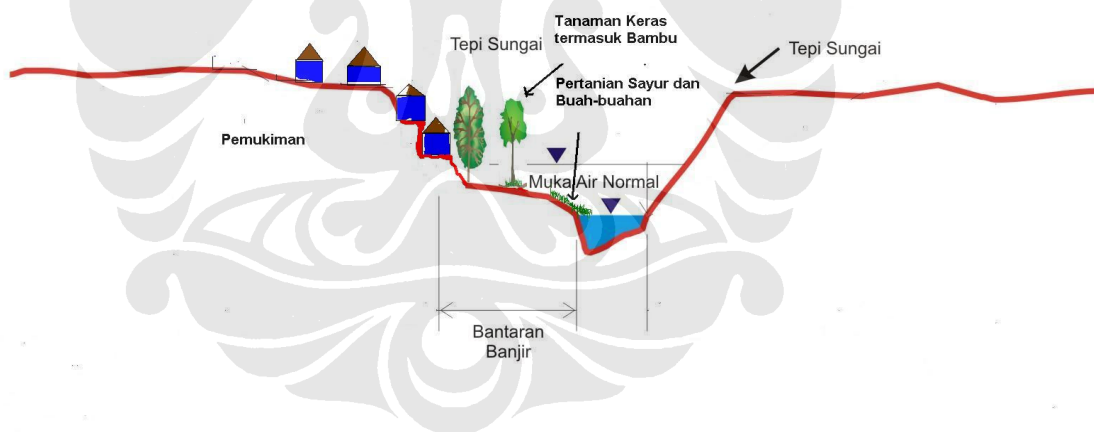
Permukiman kawasan Code Utara merupakan permukiman yang cukup padat dengan luasan yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Jenis mata pencaharian masyarakat adalah jenis-jenis pekerjaan di perkotaan terutama di sektor swasta atau informal. Sementara itu tingkat pengangguran cukup tinggi ditambah dengan kurangnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan pekerjaan yang tersedia sangat rentan dengan perubahan. Faktor-faktor ini yang menjadi persoalan sehari-hari masyarakat kawasan Code Utara untuk mengelola lingkungan kampung dan sungainya.

4.1.3. Fungsi dan Makna Sungai Bagi Masyarakat Kawasan Code Utara

Sungai Code dilihat dari asal katanya, dapat menggambarkan keadaan geografisnya. Arti nama Sungai Code berasal dari dialek Kasultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Code berarti sungai di bagian timur Kesultanan Yogyakarta yang digunakan untuk pertanian dan pengairan sawah. Hal ini menyebabkan aliran Sungai Code yang berada di perbatasan kota dikenal sebagai Bangun Rejo (sekarang Kecamatan Jetis). Kesaksian Slamet yang sudah bekerja di keraton Yogyakarta pada 1930 mengatakan bahwa Bangun Rejo menjadi daerah subur yang menjadi tempat para pendatang untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Hal

ini sesuai dengan kampung Jetisharjo yang dikenal juga dengan nama Jetis *Ledhok* Sayuran. Ledhok berarti daerah cekungan atau daerah bawah di sempadan sungai yang terdapat budidaya sayuran.

Sempadan Sungai Code sebelum tahun 1970 tidak sepadat sekarang ini, walaupun sudah ada permukiman di wilayah sempadan sungai. Masyarakat belum mendirikan permukiman sampai mendekati sungai. Ada pembatas antara permukiman dengan sungai. Daerah pembatas ini banyak ditumbuhi tanaman besar, yaitu bambu (*bamboosa*) dan pisang (*musa paradisiaca*). Beberapa wilayah bahkan terkenal dengan hutan bambunya, yaitu yang berada di wilayah RW 07. Tanaman bambu ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan rumah maupun, dinding, dan kerajinan anyaman. Sedangkan tanaman pisang diambil buahnya untuk dikonsumsi daunnya untuk dijual di pasar.



Gambar 6. Transek Sungai Code dan sempadannya sebelum tahun 1980

Wilayah batas sempadan sampai dengan sebagian badan sungai dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis sayuran. Tanaman kangkung air merupakan tanaman sayuran yang banyak ditanam (gambar 6). Ada jenis tanaman kangkung yang terkenal di daerah ini, yaitu kangkung londo (*Ipomea carnia*) yang bisa tumbuh walaupun berada di derasnya aliran Sungai Code. Tanaman ini juga memiliki fungsi untuk menahan arus air di lahan tanaman sayuran di tepi sungai.

Pohon besar yang ada di sempadan sungai tidak saja berfungsi sebagai pembatas maupun untuk hasil buah dan kayunya, tetapi juga berfungsi sebagai peneduh di sepanjang sungai. Adanya peneduh membuat hawa di sepanjang sungai terasa lebih sejuk. Banyaknya tanaman juga membuat pemandangan menjadi lebih asri. Di sisi lain, tempat yang teduh di sepanjang sungai menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan. Banyaknya jenis ikan yang mampu berkembang di tempat ini menarik perhatian masyarakat di sekitarnya. Akhirnya banyak yang memancing atau menjaring ikan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual. Agus, ketua RT. 12 menceritakan, ketika masih kecil Sungai Code merupakan tempat bermain seperti mandi di sungai dan mencari ikan atau *gogoh* di dalam lubang tempat ikan bersembunyi di tepi sungai atau di balik batu-batu (Gambar 7).



Gambar 7. Sungai dengan kondisi alam yang masih baik memungkinkan anak-anak untuk bermain dan mencari ikan di sungai tahun 1983 (FMCU)

Tanaman-tanaman besar ini juga berfungsi sebagai penahan banjir dan lahar dingin dari aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif. Banjir lahar ini juga membawa pasir dengan kualitas baik dari dasar sungai. Pasir ini terbawa ketika banjir lahar dingin melewati Sungai Code. Banyak yang mengambil jenis material bangunan ini untuk memperbaiki

rumahnya maupun dijual. Pada waktu lahar dingin membawa pasir di aliran Sungai Code, kandungan belerang ikut terbawa. Kandungan belerang ini ternyata dipercaya dapat mengobati penyakit kulit. Slamet mengatakan bahwa pada tahun 1965 pernah terjadi wabah penyakit kulit di Kota Yogyakarta. Orang datang ke Sungai Code untuk berendam mengobati penyakit kulitnya.

Hampir di setiap pohon besar yang berada di tepi sungai bisa dijumpai adanya mata air yang cukup besar. Sepanjang tepi Sungai Code terkenal dengan adanya *belik* atau sumber mata air lokal yang sangat jernih. Sumber mata air ini terdapat di sepanjang tepi kanan dan kiri Sungai Code. Sumber mata air ini yang menjadi sumber air bersih bagi warga di sekitarnya. Warga melakukan banyak aktifitas sehari-hari di sini, seperti mandi dan mencuci.



Gambar 8. Lembah Code sebagai tempat wisata remaja tahun 1970 (FMCU)

Pada tahun 1970, masyarakat masih sering turun ke sungai dimana airnya masih bersih untuk bermain air maupun melakukan kegiatan rekreasi. Pemandangan sempadan Sungai Code yang dikenal masyarakat sebagai *Lembah Code* juga masih sangat bagus sehingga banyak masyarakat yang mengabadikan kegiatan mereka di Sungai Code. Saat

itu air Sungai Code masih sangat jernih. Kondisi jalan untuk mencapai sungai juga lebih mudah karena tidak ada tebing yang terlalu curam kecuali di sisi timur yang memang cukup terjal. Warti, salah satu pelaku dalam foto menceritakan bahwa pada saat itu mereka berekreasi di Sungai Code seperti layaknya orang pergi ke Pantai Parang Tritis, yaitu pantai yang menjadi tujuan wisata terkenal di Yogyakarta saat ini (gambar 8).

Sungai Code juga dipandang secara mistis, dibuktikan dengan banyaknya orang yang melakukan meditasi di sungai. Sungai Code dianggap sebagai salah satu jalan yang menghubungkan antara mahluk halus yang tinggal di Gunung Merapi dengan mahluk halus yang tinggal di Laut Selatan. Kepercayaan ini dikenal sebagai lampor, yaitu bunyi gemrincing yang mendahului ketika akan terjadi lahar dingin. Bunyi gemrincing ini dipercaya sebagai pasukan jin Laut Selatan akan berkunjung ke Gunung Merapi. Lampor adalah peristiwa yang ditakuti pada masa itu karena terdapat kepercayaan bahwa setelah terdengar bunyi gemerincing akan ada banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin ini bisa menghancurkan permukiman di sepanjang bantaran Sungai Code. Mata air juga memiliki makna mistis bagi masyarakat sehingga setiap orang yang beraktivitas di sekitar mata air harus menjaga perilakunya.

Menurut penuturan masyarakat sungai dahulu menjadi tempat untuk beraktivitas sepanjang hari di sungai seperti mandi, mencuci dan berbagai kegiatan lain seperti bercocok tanam maupun mencari ikan. Mata air, sungai dan sempadan sungai menjadi ruang guyub atau ruang untuk pergaulan dimana orang saling bertemu dan bertegur sapa sehari-hari. Pada saat itu tidak banyak “rapat” seperti sekarang untuk membahas persoalan-persoalan kemasyarakatan, karena persoalan kampung dibicarakan di mata air atau sempadan sungai. Mbah Dono bahkan tidak jarang menerima tamunya di sempadan sungai yang menjadi lahan pertaniannya pada tahun 1960-an. Sang istri sering meminta tamu untuk menemui langsung di sungai. Sungai Code mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat di sepanjang sempadan Sungai Code, yaitu berupa

sumberdaya air, sumberdaya material, fungsi ekonomi, fungsi ekologis, fungsi rekreasi dan fungsi sosial.

Berbagai fungsi yang bisa dirasakan oleh masyarakat telah menciptakan makna sungai sebagai sumber kemakmuran. Hal ini diperkuat oleh cerita orang-orang lama yang mengatakan bahwa kawasan Kampung Jetisharjo di sepanjang Sungai Code dulu dikenal dengan nama Bangunrejo yang berarti membangun kemakmuran dan kemudian *Ledhok Sayuran*. Sungai tidak saja memberikan air dan ikan tetapi juga pilihan mata pencaharian yaitu menanam di sempadan sungai. Pertumbuhan pemukiman di sempadan Sungai Code telah menghilangkan makna bangunrejo ini karena Sungai Code tidak lagi menjadi sumber kemakmuran dari lahan pertanian dan berbagai sumberdaya yang bisa dimanfaatkan lagi. Sumber air atau yang dikenal sebagai *Belik* merupakan salah satu yang masih bermakna penting saat ini yaitu sebagai sumber air bersih yang masih bisa dirasakan masyarakat hari ini.

4.2. Permasalahan Lingkungan

Perkembangan kota menyebabkan tingginya pertambahan jumlah penduduk di kawasan sempadan Sungai Code. Daerah-daerah yang tadinya berupa lahan kosong untuk menanam berbagai pohon dan tanaman sayuran berubah menjadi rumah penduduk. Pertumbuhan permukiman yang tidak tertata ini juga menjadikan kawasan sempadan makin padat dan semakin sempitnya jalan-jalan yang menghubungkan antar rumah.

Kondisi rumah-rumah penduduk dapat ditinjau dari kualitas rumah yang meliputi kualitas dinding, lantai, atap, dan letaknya. Di Kawasan Code Utara ini masih ada rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni. Hal ini ditandai dengan lantai tanah, kontruksi dinding dari anyaman bambu atau papan yang sudah usang, atap yang tidak terstruktur rapi dan rawan oleh pantulan air ketika hujan, serta letak rumah pada lahan dengan kemiringan yang rawan longsor.

Ketidaklayakan rumah sebagai tempat hunian mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2005 tentang penetapan parameter kemiskinan Kota Yogyakarta yang merupakan kombinasi indikator kebutuhan dasar yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), indikator Keluarga Sejahtera oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Indikator Model Pembangunan Manusia oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Indikator Keluarga Sejahtera oleh BKKBN adalah salah satu indikator yang banyak dijadikan sebagai acuan oleh penduduk.

Tabel 10. Kualias Rumah Berdasarkan Jumlah KK di Code Utara

Kualitas Rumah	Jumah KK	Persentase
Dinding :		
Tembok beton	529	88.61
Papan kayu	18	3.02
Bambu	50	8.37
Jumlah	597	100.00
Lantai :		
Keramik	357	59.80
Semen/ubin	182	30.49
Bata/tanah	58	9.71
Jumlah	597	100.00
Atap :		
Genteng	555	92.96
Asbes	39	6.53
Sirap	3	0.51
Jumlah	597	100.00

Sumber : Dinas Kimpraswil DIY, Data Sekunder, Tahun 2005

Bangunan yang masih memakai anyaman bambu hanya tinggal sedikit. Kebanyakan bangunan ini hanya dimiliki oleh masyarakat yang secara ekonomi pendapatannya lebih rendah dari masyarakat di Kawasan Code Utara pada umumnya. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, perubahan ini terjadi sejak tahun 1980. Pada saat itu terdapat program pemerintah yang menetapkan bahwa rumah sehat adalah rumah yang berdinding tembok dan berlantai keramik atau semen. Masyarakat membangun rumah

dengan dinding tembok serta lantai dari keramik atau semen untuk supaya tidak dimasukan sebagai masyarakat miskin. Tindakan ini diambil untuk menghindari rasa malu bila dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera. Perubahan yang dipaksakan ini diiringi dengan kualitas bangunan yang kurang kokoh dan baik.

Pada saat ini masih terdapat beberapa rumah tembok yang terlihat suram dan kumuh. Tidak sedikit pula yang berlumut karena biaya untuk mengecat rumah semakin mahal. Sementara itu rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu juga masih ada (gambar 9).



Gambar 9. Rumah berdinding bambu sebagai citra kekumuhan dan kemiskinan tahun 2003 (Dokumentasi FMCU)

Dinding bambu relatif mahal karena tidak lagi diproduksi oleh masyarakat sekitar sehingga harus mendatangkan dari tempat yang lebih jauh. Hal ini menyebabkan banyak rumah yang terbuat dari anyaman bambu tidak terawat dan banyak mengalami

pelapukan. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, bangunan ditutup dengan bahan seadanya sehingga menyebabkan kondisi rumah menjadi semakin suram dan kumuh.

Rumah dengan status milik sendiri sebesar 75,71 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kawasan Code Utara sebagian besar telah menetap di rumah dengan status yang sudah diakui oleh negara. Pengakuan status kepemilikan rumah ini berdasarkan pada kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama mereka yang selalu mereka penuhi setiap tahunnya. Padahal pada kenyataannya status tanah di sempadan Sungai Code tersebut sebagian besar masih berada dalam status kepemilikan Keraton Yogyakarta (*Sultan Ground*). Masyarakat yang lama tinggal di wilayah ini juga masih tahu bahwa mereka tinggal di atas *Sultan Ground* yang merupakan tanah milik keraton. Berdasarkan luasnya, rata-rata rumah memiliki luas antara 20 – 50 m² yaitu sebesar 48,74 %. Ada pula yang luas rumahnya tidak lebih dari 50 m² (tabel 11).

Tabel 11. Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan dan Luasnya di Kawasan Code Utara

Rumah	Jumah KK	Persentase
Status Kepemilikan :		
Milik sendiri	530	75.71
Sewa	67	9.58
Menumpang	103	14.71
Jumlah	700	100.00
Luas Rumah :		
< 20 m ²	91	15.24
20 – 50 m ²	291	48.74
> 50 m ²	215	36.01
Jumlah	597	100.00

Sumber : Data FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Di kawasan Code Utara terdapat istilah *wedi kengser* yang berarti pasir yang bergeser. Aliran air Sungai Code yang berkelok-kelok selalu memunculkan dua sisi yang berbeda dimana di sisi terjangan aliran air akan terjadi pengikisan tetapi sisi seberangnya memunculkan tanah baru dari sedimentasi. *Wedi kengser* ini menjadi persoalan karena

sering muncul dan tenggelamnya tanah sesuai aktivitas aliran Sungai Code sehingga kepemilikan lahan menjadi tidak jelas.

Masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Code selama ini menjadi masyarakat perkotaan yang dianggap lemah secara ekonomi, sosial dan kultural. Berbagai istilah seperti pinggir kali (tepi sungai), *ledhok* (daerah rendah), menggambarkan posisi mereka yang berada di pinggiran atau tingkat bawah dari masyarakat. Pembangunan yang pesat di perkotaan sering meninggalkan kawasan sempadan sungai dari penataan dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai untuk masyarakat. Hal ini juga berdampak kepada perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Daya dukung lingkungan dan fungsi daya dukung untuk kehidupan masyarakat sekitarnya semakin berkurang (Gambar 10).



Gambar 10. Code dengan talud dan lebar sungai yang makin sempit tahun 2007

Pola membuang sampah tidak dapat dilakukan dengan cara membuat lubang lagi. Sungai menjadi salah satu pilihan yang paling murah dan tidak terlihat karena begitu dibuang ke sungai sampah akan segera hanyut oleh aliran air yang deras. Pelayanan pemerintah untuk pengangkutan sampah terhambat dengan kondisi jalan masuk yang terbatas. Jalan-jalan kecil dan terjal juga merupakan hambatan utama masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah yang baik dalam skala kawasan karena gerobak pengangkut sampah tidak dapat melayani seluruh warga tanpa adanya partisipasi dari masing-masing warga dan pengurus RT (Gambar 11).



Gambar 11. Jalan setapak menuju Sungai Code tahun 2007

Wilayah-wilayah penyangga sempadan Sungai Code juga mulai ditempati oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan vegetasi tanaman terutama bambu (*Bambusa*) yang menjadi pengaman sempadan sungai yang curam banyak berkurang. Beban sempadan juga semakin tinggi dengan makin banyaknya rumah yang dibangun di atas sempadan sungai. Ancaman tanah longsor pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena perlindungan dari akar-akaran pohon dan juga tajuk pohon yang dapat melindungi tebing sungai dari terpaan hujan langsung telah hilang (Gambar 12).



Gambar 12. Talud yang rentan terhadap longsor tahun 2008

Departemen Pekerjaan Umum menyikapi keadaan ini dengan membangun talud di kedua sisi sungai. Pembangunan talud ternyata tidak menyelesaikan semua persoalan. Justru semakin memutus hubungan dan menjauhkan masyarakat dari sungai yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka. Situasi ini muncul karena talud tidak dilengkapi dengan fasilitas jalan atau tangga bagi masyarakat untuk turun ke sungai. Pembangunan jalan menuju sungai justru dibangun di lokasi yang memang tidak ada rumah penduduk. Lokasi pembangunan jalan ini dirasakan hanya ditujukan untuk kepentingan intansi terkait dalam melakukan pembangunan dan pemantauan sungai, bukan untuk memberikan jalan bagi masyarakat setempat.

Pembatas antara pemukiman dan sungai yang berupa tanaman habis ditebang untuk keperluan pembuatan talud. Dampak pembuatan talud ternyata membuat semakin lebarnya tanah yang bisa ditempati warga sehingga sempadan Sungai Code semakin

habis. Rumah-rumah yang didirikan tidak beraturan dan tidak disesuaikan dengan arah hadap sungai dan jalan sehingga memunculkan gang-gang sempit. Selain itu masyarakat juga semakin meluaskan bangunannya ke arah sungai. Perluasan bangunan rumah di sepanjang sempadan sungai menyisakan halaman belakang rumah yang merupakan bagian atas dari talud, menjadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah oleh semua masyarakat sekitar sempadan sungai.

Lahan yang tersisa di atas bangunan talud dibiarkan menjadi wilayah tak bertuan sehingga tidak ada aturan yang ditaati dan disegani warga untuk tidak membuang sampah di lahan di atas talud tersebut. Pemilik rumah yang berada di tepi sungai juga tidak bisa berbuat banyak karena tanah itu bukan milik mereka. Akhirnya mereka juga ikut membuang sampah di situ. Pada saat musim hujan air di Sungai Code cukup tinggi. Sampah yang semakin menumpuk didorong ke sungai atau langsung dimasukkan ke sungai. Terkadang masih banyak sampah yang tercecer di bibir talud. Perubahan sempadan sungai menjadi tempat sampah membuat mata air yang ada di bawahnya tidak dapat dimanfaatkan lagi (Gambar 13).



Gambar 13. Sungai sebagai halaman belakang tahun 1999 (FMCU)

Proses pembangunan talud dianggap sebagai salah satu penyebab hilangnya beberapa mata air besar oleh warga sempadan Sungai Code. Mata air besar banyak terdapat di sepanjang sungai hilang atau tidak mungkin dimanfaatkan dengan baik karena tidak ada ruang lagi untuk membuat penampungan yang memadai. Pembangunan talud ini akhirnya memicu kemarahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Dari sisi masyarakat, pembangunan ini dianggap sebagai pelanggaran pemerintah untuk memanfaatkan Sungai Code yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat.

Sejak awal pembangunan, berbagai kritik dan masukan masyarakat sudah disampaikan. Pada masa ini menurut Totok Pratopo, salah satu warga yang pernah menjadi ketua RW, kepedulian atau perhatian masyarakat terhadap Sungai Code mulai hilang atau terputus karena merasa manfaat yang diberikan sungai sudah tidak ada lagi. Pada awalnya masyarakat menyalaki cara mencapai sungai dengan membuat tangga-tangga dari bambu maupun kayu. Cara ini tidak bertahan lama karena seringnya tangga-tangga ini hilang atau rusak karena pelapukan.

Persoalan lain muncul dengan adanya pembangunan Perumahan Griya Asri yang merupakan perumahan kelas menengah yang juga memanfaatkan lahan sempadan sungai. Keberadaan Perumahan Griya Asri yang berbeda dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kampung Jetisharjo menimbulkan jarak antara kedua kelompok masyarakat ini. Hal ini diperparah dengan pembangunan tembok batas permanen setinggi 4 meter antara perumahan dengan kampung Jetisharjo di RW 06 dan RW 07. Masyarakat di Perumahan Griya Asri juga tidak melakukan interaksi dengan masyarakat di luar lingkungan permukimannya yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Tembok tinggi ini juga memberikan kesan kumuh dan terisolirnya warga sempadan Sungai Code karena jalan menuju wilayah mereka semakin sempit. Sempitnya jalan masuk itu menambah sulitnya sarana dan prasarana pembangunan serta pengelolaan lingkungan masuk ke daerah tersebut.

Sistem pembuangan air di sempadan Sungai Code belum tertata secara sistematis. Sistem drainasi belum terstruktur dengan saluran primer, sekunder, dan tersier. Masih dijumpai beberapa saluran dengan kondisi dimensi kurang memenuhi syarat sebagai penampung limpasan (debit) air hujan pada luasan daerah tertentu. Belum ada saluran yang cukup untuk menampung limpasan air ketika terjadi hujan besar.

Pengelolaan air limbah masih menjadi persoalan karena tidak semua rumah memiliki sarana pengelolaan limbah buangan dari MCK. Sistem komunal yang dilakukan ada di proyek percontohan dengan membangun MCK umum yang dipakai oleh 147 warga atau 21%. Sarana MCK permanen yang dimiliki perorangan sebesar 74% belum semua terlayani oleh sistem IPAL komunal sehingga masih banyak yang membuang limbah MCK ke sungai.

Tabel 13. Jumlah KK yang Menggunakan Sarana MCK Berdasarkan Kualitasnya di Kawasan Code Utara

Sarana MCK	Jumah KK	Persentase
Permanen	518	74.00
Semi permanen	9	1.29
Menumpang	147	21.00
Sungai	26	3.71
Jumlah	700	100.00

Sumber : Monografi FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Kebiasaan sebagian penduduk untuk melakukan kegiatan membuang hajat di sungai yang tidak bisa dihilangkan. Kebiasaan membuang hajat di sungai itu susah dihindarkan walaupun sudah ada MCK umum (tabel 13). Alasannya yaitu pertama adalah panjangnya antrian dan jarak untuk mencapai lokasi MCK terlalu jauh. Kedua adalah faktor kebiasaan penduduk yang secara psikologis merasa nyaman dan lebih mudah melakukan kegiatan buang air besar bila mendengar air mengalir atau sebagian badannya terendam air.

Pembangunan yang telah dilakukan di Kawasan Code Utara dilakukan untuk memberikan pelayanan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu pembangunan ini juga ditujukan untuk menjaga Sungai Code sebagai salah satu sarana pembuangan air utama pada saat hujan dan ancaman banjir lahar dingin. Ternyata pembangunan yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan maupun harapan masyarakat.

Kawasan sempadan Sungai Code tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kawasan ini tumbuh tanpa adanya pengaturan atau acuan pada tata ruang tertentu. Setiap lahan kosong akan segera didirikan rumah tanpa adanya perencanaan yang baik. Kepadatan ini juga diikuti dengan prasarana umum yang kurang memadai. Kepadatan penduduk yang terus tinggi akan meningkatkan beban lingkungan yang tinggi pula pada sempadan sungai. Semakin banyak wilayah sempadan yang berubah menjadi wilayah hunian. Pengelolaan sampah cair maupun padat yang selama ini dilakukan di sekitar sempadan sungai mulai menimbulkan masalah karena tidak mampu ditangani lagi oleh sistem alami dari sungai tersebut. Kondisi pengelolaan lingkungan yang cukup berat terjadi ketika adanya pembangunan talud yang menyebabkan masyarakat justru makin mendekati sungai karena pembangunan talud ini menciptakan ruang datar di atasnya. Sungai yang menjadi penopang hidup mereka telah berubah fungsinya. Masyarakat menjadi terasingkan dari sungai baik dari manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis. Interaksi antara masyarakat dengan sungai telah banyak berkurang.

4.3. Praktek Pengelolaan Lingkungan

4.3.1. Program-Program Pembangunan di Sungai Code Utara

Banjir besar pada tahun 1986 mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan yang ada di kawasan permukiman sempadan sungai. Pemerintah kemudian mengembangkan program untuk membersihkan sempadan sungai, termasuk Kawasan Sungai Code. Pada tahun 1986 pembangunan talud pertama kali dilakukan di Kampung Ratmakan dengan bantuan ABRI Masuk Desa (AMD). Pada saat yang sama

pemerintah juga mencoba menggusur permukiman di sepanjang Sungai Code. Pada saat itu Romo Mangun yang telah mendampingi masyarakat Code di Kampung Gondolayu sejak tahun 1982 menolak penggusuran. Penolakan ini dilakukan melalui berbagai jalur birokrasi dan budaya (Khudori, 2002). Usaha penggusuran ini tidak jadi dilaksanakan namun program pembangunan talud di sepanjang sungai terus dilakukan.

Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian mencoba memperbaiki lingkungan di Sempadan Sungai Code dengan menggunakan konsep Tribina/Tridaya yang sebelumnya telah diterapkan oleh Romo Mangun. Konsep Tribina/Tridaya merupakan pendekatan yang berupa pemberdayaan sumber daya manusia setempat dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik dan kualitas lingkungan (Khudori, 2002).

Selain konsep Tribina/Tridaya juga Program Kali Bersih (PROKASIH) yang dilakukan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Program ini dijadikan kegiatan rutin tahunan yang idenya bertujuan untuk menciptakan sungai yang bersih dari sampah-sampah yang berada didasar sungai, indah dipandang dan nyaman bagi warga sekitar sempadan sungai; yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya banjir serta munculnya berbagai macam penyakit. Bentuk bantuan berupa subsidi kerja bakti sungai. Sementara itu, Dinas Prasarana Kota (PRASKOT) memfokuskan pada pembangunan fisik yaitu membangun talud.

Di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum, PT Cipta Karya membangun jembatan, MCK umum, saluran air hujan dan memberikan bantuan pipa untuk mendukung usaha air bersih yang telah ada sebelumnya (Usaha Air Bersih Tirta Kencana). Dinas Pengairan pada tahun yang sama juga membangun talud di sebagian tepi Sungai Code. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) juga meluncurkan program peningkatan kapasitas lembaga masyarakat setempat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Bentuk-bentuk kegiatannya adalah mengadakan sarasehan, seminar

dan lokakarya guna mengenalkan daerah Bantaran Sungai Code di lingkungan akademis maupun masyarakat luas.



Gambar 14. MCK umum di atas bangunan IPAL komunal tahun 2008

Serangkaian program perbaikan lingkungan yang dikelola oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) seperti Program Perbaikan Rumah dan Permukiman (P2P) dan Proyek Peningkatan Prasarana Permukiman (P3P), juga dilaksanakan dengan fokus perbaikan infrastruktur kampung perkotaan. Program ini tak jauh berbeda dengan pendahulunya yaitu Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota (P2LP) atau yang terkenal dengan *Kampung Improvement Project* (KIP), yang dilaksanakan pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Tahun 2001 P2LP bekerjasama dengan Markas Besar TNI membentuk Manunggal Karya Bakti (MKB). Hasil kegiatan yang dicapai adalah perbaikan fisik dan kelembagaan, seperti: penyuluhan pada organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, perbaikan sarana umum, perbaikan rumah dan pembangunan MCK. Pembangunan MCK umum dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal untuk menampung limbah cair belum dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat sempadan Sungai Code. Keterbatasan daya tampung dari fasilitas ini membuat banyak

masyarakat kembali pada kebiasaan semula yaitu membuang limbah cair langsung ke sungai (Gambar 14).

Tabel 14. Jumlah Sarana Pembuangan Limbah di Kawasan Code Utara

Sarana	Jumah KK	Persentase
Limbah Cair :		
Bak Penampung Tertutup	275	39.29
Bak Penampung Terbuka	1	0.14
Ke Sungai	424	60.57
Limbah Padat :		
Bak Sampah	692	98.86
Galian Tanah	8	1.14
Ke Sungai	0	0.00
Jumlah	700	100.00

Sumber : Data Sekunder FMCU, Survei Kampung Tahun 2006

Pembuangan limbah cair oleh masyarakat sekitar sungai cukup besar yaitu 60,57 % (tabel 14). Pembangunan bak-bak penampung komunal yang berasal dari Program Pemerintah Kota pada tahun 2004 tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga. Pengelolaan limbah cair ini diakui oleh para pengurus RW dan RT menjadi persoalan yang susah untuk ditangani dimana pembangunan IPAL membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu pihak pemerintah belum mempunyai anggaran untuk menambah IPAL komunal baru guna melayani seluruh pembuangan limbah cair dari warga, terutama yang letaknya berjauhan dari fasilitas IPAL yang telah ada. Pembuangan limbah padat sudah bisa ditangani oleh masyarakat secara mandiri.

Selain itu, terdapat pula program Stimulan PMK dalam bentuk bantuan uang untuk dikelola secara kelompok guna membuat suatu usaha bersama. Distribusi keuangan dilakukan lewat kelurahan dan besaran bantuan perkelompok sebanyak Rp.40 juta sampai Rp.60 juta. Program yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin khususnya yang berada di wilayah perkotaan. Bantuan yang didapatkan sebesar Rp.250 juta untuk dikelola secara swadaya dengan membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat kelurahan.

Beberapa perguruan tinggi juga turut andil dalam program yang berkaitan dengan masyarakat di Sempadan Sungai Code. Masalah yang ada pada masyarakat di sempadan Sungai Code mulai diperhatikan oleh beberapa universitas, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atmajaya. Keterlibatan perguruan tinggi ini dimulai pada akhir tahun 1990. Program yang cukup besar terjadi pada tahun 2001 yaitu kerjasama antara UGM dengan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang menitikberatkan pada Kawasan Code Utara.

Program-program yang dilakukan di Kawasan Code Utara menjadi salah satu tempat pembelajaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan. Program-program fisik yang dilakukan instansi pemerintah pusat maupun daerah telah banyak membantu warga mengatasi persoalan sehari-hari yang berhubungan dengan ketersediaan air serta berbagai sarana dan prasarana pendukungnya. Masyarakat juga belajar mengorganisasikan diri untuk menjadi bagian dari proses perbaikan lingkungan di kawasannya sendiri.

4.3.2. Pengelolaan Air Tirta Kencana

Aliran Sungai di Kawasan Code Utara memiliki beberapa mata air dengan debit yang cukup besar. Sebelum adanya Tirta Kencana masyarakat langsung memanfaatkan air dari mata air yang ada. Salah satu mata air yang terbesar adalah mata air Sentong yang berada di sisi timur sungai dan berada di wilayah Kampung Terban yang tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau sekalipun. Pemakai mata air *Sentong* juga berasal dari warga Kampung Jetisharjo.

Beberapa sumber mata air lain juga cukup besar airnya sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh warga dengan membuat bak atau memasang pipa untuk mengalirkan air yang dapat dipakai langsung oleh masyarakat. Pemanfaatan langsung mata air ini masih dijumpai sampai hari ini terutama di sisi sebelah timur sungai yang memiliki sisa

sempadan sungai untuk dimanfaatkan sebagai tempat mandi (gambar 15). Hal ini juga disebabkan sedikitnya fasilitas umum di sisi sebelah timur sungai seperti tempat MCK.



Gambar 15. Pemanfaatan langsung mata air Sungai Code tahun 2008

Sejak dibangun talud pada tahun 1996 masyarakat makin berat untuk mendapatkan air karena harus turun melalui tangga kayu dari talud dan menyeberang sungai dengan membawa ember atau tempat penampung air lainnya. Perkembangan pengelolaan air selanjutnya berawal dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) *ekstention*, UGM. Pada saat itu masyarakat diajak ke Sungai Elo, Kabupaten Magelang pada tahun 1997 untuk melihat pengelolaan air secara swadaya dengan menggunakan pompa hidran. Pompa ini menggunakan tenaga gravitasi. Air yang terpompa keatas dihasilkan dari aliran air yang menghasilkan daya dorong air ke permukaan kembali. Setelah melalui *rembug warga* pada tahun 1997, masyarakat Kawasan Code Utara secara swadaya mengumpulkan dana sebesar Rp. 125.000 untuk membeli pompa hidran dari Pengelola Air Sungai Elo.

Pemasangan alat sederhana ini ternyata tidak memuaskan masyarakat karena debit air yang dihasilkan sangat kecil. Hanya beberapa kepala keluarga yang dapat menikmatinya. Kondisi ini memunculkan konflik baru di antara masyarakat karena ada yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih walaupun ikut terlibat dalam *rembug warga*. Untuk mengatasi hal tersebut maka air yang berhasil ditarik ke atas kemudian ditampung di dalam bak besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lebih banyak.

Program air bersih hasil swadaya masyarakat ini pada tahun 1999 mendapat perhatian dari Menteri Pekerjaan Umum. Ir. Bambang Rachmadi yang menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu, didampingi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkunjung untuk melihat program ini. Hasil dari kunjungan ini adalah bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum berupa pemasangan pompa listrik, penyempurnaan pipa peralon 1,5 inchi sepanjang 200 meter dan menara air setinggi 5 meter. Pembangunan tahap ini dapat memberikan kemudahan kepada 23 kepala keluarga di dalam mendapatkan kebutuhan air yang berupa sambungan langsung ke rumah. Dari pengelolaan 23 warga ini kemudian terbentuk pengurus pemeliharaan dan penetapan iuran.

Pada tahun 2001 Sub Dinas Cipta Karya Kimpraswil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperbaiki kembali sistem pengelolaan air dengan kekuatan pompa yang lebih besar. Perbaikan ini mampu menyalurkan air sampai ke 65 sambungan langsung ke rumah. Bantuan juga berupa pemasangan *water meter* di setiap rumah sehingga iuran air dapat ditetapkan melalui perhitungan penggunaan air dari masing-masing rumah. Akhirnya pengurus dan masyarakat pengguna air membentuk Usaha Air Bersih

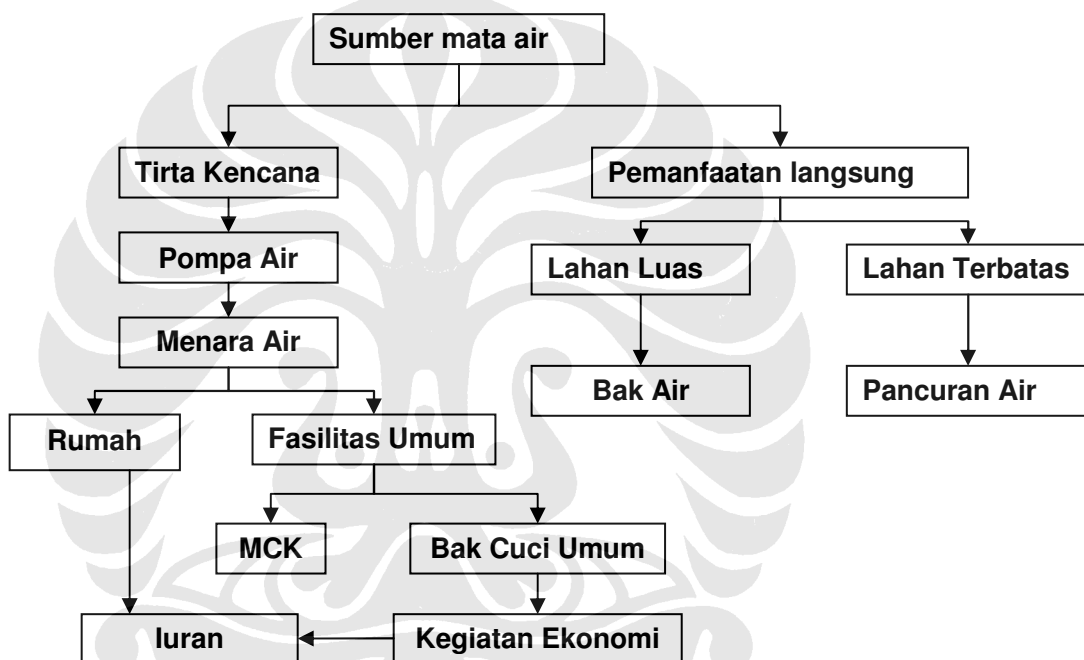


Gambar 16. Rumah Pompa Tirta Kencana. Sarana penyediaan air warga secara mandiri

Tirta Kencana. Usaha ini pada tahun 2008 telah mampu melayani 166 kepala keluarga. Terbentuknya Usaha Air Bersih Tirta Kencana memberikan kesadaran bagi sebagian warga bahwa pengelolaan sungai dengan baik akan memberikan manfaat yang tidak sedikit buat kehidupan mereka (Gambar 16). Masyarakat yang berlangganan air ditarik biaya untuk keberlangsungan layanan air ini. Besarnya biaya untuk: 1-15 kubik air = Rp.500,00, 15-30 kubik = Rp.700,00, dan 30-seterusnya = Rp.1000,00. Biaya ini cukup murah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM) yang mencapai 3 kali lipatnya. Musmo Diyono melalui *rembug warga* menjadi koordinator pengurus Tirta Kencana yang bertugas untuk menarik iuran dan memelihara rumah pompa, menara penampung air dan mata air *Sentong*.

Terbatasnya distribusi air kemudian memunculkan gagasan untuk membuat tempat penampungan air umum yang dapat dipakai bersama. Fasilitas umum ini tidak hanya

bisa digunakan untuk kegiatan mandi dan MCK. Adanya bak besar dan ruangan yang dapat dipakai bersama-sama juga bisa menjadi tempat cuci bersama. Fasilitas ini kemudian banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai buruh cuci. Tirta Kencana menarik iuran dari rumah-rumah yang mendapatkan saluran air dan dari bak cuci umum yang dipakai para buruh cuci yang membayar yang digunakan untuk pemeliharaan alat dan juga pemeliharaan lingkungan di sekitar mata air.



Gambar 17. Skema Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Code

Pengelolaan air bersama merupakan salah satu langkah penting bagi masyarakat Sempadan Sungai Code untuk mengatasi persoalan air bersih. Selama ini air hanya dimanfaatkan secara individual dan tidak adanya pengaturan terhadap pemanfaatannya. Kemudian pemanfaatan secara kelompok yang diatur oleh suatu lembaga pengelolaan masyarakat mampu mendorong masyarakat untuk bekerjasama melakukan pemeliharaan fasilitas-fasilitas Usaha Air Tirta Kencana dan perbaikan sumber mata air yang dipakai (Gambar 17). Kelembagaan pengelolaan air ini juga telah memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumber air yang telah ada.

Sumber air bersih tanpa proses penyaringan yang mahal dapat menjadi motivasi bagi pemeliharaan sumber air ini. Kelembagaan ini memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat untuk dapat mengelola sempadan sungai dan menjaga kualitas air di sepanjang sempadan Sungai Code.

4.3.3. Forum Masyarakat Code Utara (FMCU)

Forum Komunikasi Masyarakat Code Utara (FMCU) terbentuk pada tahun 2001 melalui proses yang panjang. Pada saat itu melalui pendekatan dari berbagai pihak baik dari pemerintah kota, Universitas Gadjah Mada maupun masyarakat itu sendiri terdapat kesepakatan untuk membentuk Forum Rembug Warga yang bertujuan untuk membicarakan persoalan yang muncul seputar Sempadan Sungai Code. Forum ini yang merupakan awal terbentuknya FMCU yang dikenal sampai hari ini. Pada awal berdirinya forum ini dipimpin oleh presidium yang terdiri dari tiga ketua RW, yaitu Moeslimin (RW 05), Sarbini (RW 06), Totok Pratopo (RW 07). Pada perkembangan selanjutnya tokoh masyarakat dari RW 1 Kampung Terban yang berada di sebelah timur Sungai Code ikut bergabung.

Perkembangan Forum Rembug Warga akhirnya menetapkan FMCU sebagai nama resmi organisasi kemasyarakatan. Seperti organisasi masyarakat pada umumnya, FMCU juga memiliki Ketua I. Ketua I didampingi oleh tiga ketua yang sederajat. Selain sekretaris dan bendahara lembaga ini memiliki beberapa bidang yaitu usaha dan dana, prasarana fisik, ekonomi produktif, lingkungan hidup, pengembangan sumber daya masyarakat serta seni dan budaya.

FMCU memiliki visi menata Kawasan Code Utara menuju wisata Code. Misi yang dilakukan oleh FMCU adalah mengembangkan potensi Sungai Code dengan kekayaan sumberdaya fisik dan hayati yang ada, serta memberdayakan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Visi misi ini memiliki enam tujuan yaitu: (1). Melestarikan ekosistem Sungai Code dengan kekayaan sumberdaya fisik dan hayati yang dimiliki sebagai aset Wisata Code; (2). menata lingkungan permukiman masyarakat sekitar

Sungai Code agar berkembang menjadi masyarakat yang mandiri; (3). membangun ikatan sosial masyarakat sekitar Sungai Code agar berkembang menjadi masyarakat yang mandiri; (4). mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada untuk mendukung Wisata Code; (5) menggali serta mengembangkan seni dan budaya yang pernah hidup sebagai aset Wisata Code; (6) mengembangkan wawasan dan ketrampilan masyarakat di Kawasan Code Utara guna mendukung kegiatan-kegiatan Wisata Code.



Gambar 18. Pengurus FMCU membahas persiapan Merti Code tahun 2007

Forum Masyarakat Code Utara (FMCU) memiliki kegiatan yang semakin beragam setiap tahunnya karena semakin banyak pihak yang terlibat. Tahun 2002 FMCU bersama masyarakat berhasil menyelesaikan jalan setapak di sepanjang RW 05 sampai dengan RW 07 yang selama ini menjadi tempat pembuangan sampah karena tidak adanya penataan yang baik. Pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah ke sungai dilaksanakan pada tahun 2003 sampai sekarang.

Perkembangan Usaha Air Bersih Tirta Kencana dan terbentuknya Forum Masyarakat Code Utara (FMCU) semakin mendorong masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya. Arah hadap rumah semula membelakangi Sungai Code mengalami banyak perubahan (Gambar 19). Adanya pembangunan jalan setapak di atas talud menjadi akses jalan bagi warga. Jalan setapak ini mendorong warga, terutama yang tepat berada di bibir sempadan sungai untuk menjaga kebersihan. Pemandangan sempadan sungai dengan tumpukan sampah mulai berkurang. Masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai.



Gambar 19. Penataan lingkungan oleh masyarakat sempadan Sungai Code

Masyarakat yang tinggal di sepanjang bibir sungai menjadi pengawas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang membuang sampah di depan rumah mereka. Tindakan langsung berupa teguran dari ketua RT. Ketua RT dibebani tanggung jawab untuk memperingatkan warga yang membuang sampah di

sungai. Selain itu tugas ketua RT menjadi pengawas terhadap kebersihan lingkungan di sepanjang koridor jalan setapak tersebut.

Tugas-tugas ketua RT ini telah diputuskan dalam rapat FMCU dan selalu diingatkan dalam setiap kesempatan. Tugas pengawasan menjadi semakin mudah dengan adanya sikap “*sungkan*” yang hidup di kalangan masyarakat setempat. Adanya sikap malu untuk melewati halaman depan rumah orang lain ketika akan membuang sampah langsung ke sungai. Pelarangan pembuangan sampah ini diperkuat dengan adanya slogan atau papan yang terpampang di sepanjang koridor jalan (Gambar 20)



Gambar 20. Peraturan lokal tentang pelarangan pembuangan sampah tahun 2008

Jalan setapak yang membatasi rumah penduduk dengan sungai merubah kesan kumuh yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari. Halaman rumah yang sempit karena berhimpitan dengan rumah di dekatnya mulai ditata dengan berbagai jenis tanaman. Pagar pembatas antara jalan dengan sungai juga dipasang berbagai macam pot tanaman. Bak sampah sudah dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Pemakaian pagar sebagai tempat untuk menjemur pakaian dan kasur terkadang masih

dijumpai karena ketiadaan lahan bagi warga untuk menjemur. Walaupun demikian telah ada kesepakatan untuk tetap menjaga kerapihan dengan tidak membuat tali dan tiang yang melintang di atas jalan. Jalan setapak ini sekarang setiap pagi sampai malam tidak pernah sepi dari aktivitas orang. Acara makan bersama untuk merayakan hari besar keagamaan atau peringatan peristiwa penting tertentu sering dilakukan di jalan ini dengan memasang tenda yang memanjang di atas jalan setapak.

Anggota masyarakat yang secara sukarela membersihkan sungai semakin banyak. Contohnya adalah Bapak Subadi. Bapak Subadi membersihkan sungai dari berbagai sampah yang hanyut dari daerah hulu. Tidak jarang sampah yang hanyut berukuran besar dan susah untuk disingkirkan, seperti kasur. Sampah besar ini akan tersangkut dan menahan sampah lebih banyak. Sampah yang semakin banyak akan tertahan di bawah jembatan Sardjito sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak enak dilihat serta bau yang kurang sedap. Bapak Subadi termasuk orang yang dituakan dan merupakan penduduk yang sejak lahir tinggal di sempadan sungai.

Sampah organik yang berhasil dikumpulkan ditumpuk di pinggir sungai. Penumpukan sampah organik ini merupakan salah satu usaha sederhana untuk membuat pupuk yang digunakan sebagai penyubur tanaman pisang di sepanjang sempadan sungai. Pohon-pohon pisang ini sengaja ditanam oleh Bapak Subadi sebagai upah atas usahanya untuk membersihkan sungai. Warga masyarakat sekitar juga sepakat bahwa tanaman pisang yang ada di pinggir sungai adalah hak Bapak Subadi.



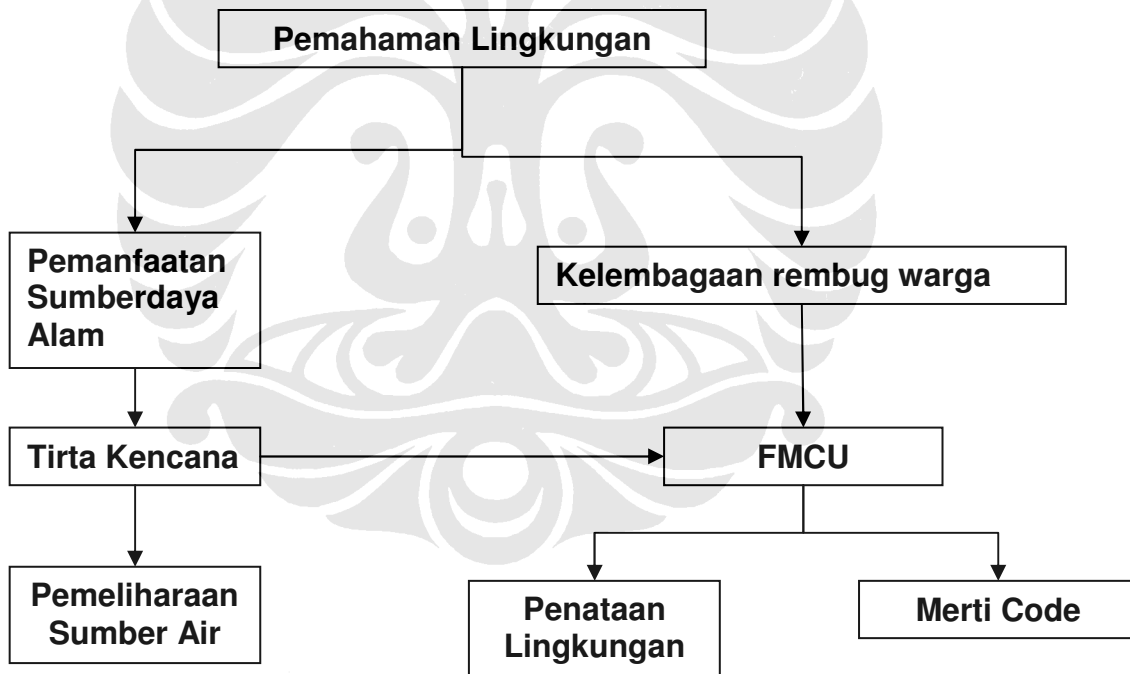
Gambar 21. Usaha Bapak Subadi membersihkan sungai tahun 2008

Selain membersihkan sampah, Bapak Subadi juga membersihkan batu-batu bekas material talud dan lainnya yang ada di badan sungai untuk dikumpulkan kembali ke daratan (Gambar 21). Hal ini dilakukan untuk menjaga agar aliran sungai tetap lancar. FMCU bersama dengan RW-RW di kampung Jetisharjo dan Terban juga sepakat untuk mendorong pengelolaan sampah di RW masing-masing sehingga tidak membuang di sungai.

Pengelolaan sampah mandiri juga dilakukan oleh warga. Masyarakat RW 5 di Kampung Jetisharjo yang membayar tenaga pengambil sampah dan penarik gerobak. Tenaga bayaran ini yang akan mengambi sampah setiap pagi dan membawanya ke tempat penampungan sementara milik dinas kebersihan kota Yogyakarta di jalam AM Sangaji. Setiap rumah dikenakan iuran sebesar Rp. 5000,- setiap bulan. Uang tersebut dipakai untuk membayar retribusi sampah yang dibayarkan kepada pemerintah

kotamadya sebesar Rp. 1.200,-. Sisanya diberikan kepada petugas pengumpul sampah tersebut.

Pengelolaan sampah di RW 6 dikelola oleh pemuda dan pemudi setempat. Pemuda dan pemudi yang dipimpin oleh Supmanto mempunyai jadwal pengambilan sampah dan pembagian kerja. Para pemudi bertugas mengumpulkan sampah sedangkan para pemuda mengangkutnya ke tempat penampungan sementara dengan gerobak. Iuran yang ditarik dari warga digunakan untuk kegiatan kepemudaan yang ada di RW tersebut seperti kegiatan rekreasi bersama ketika masa liburan sekolah. Aturan untuk melakukan giliran pengambilan dan pengumpulan sampah ini dilengkapi dengan sanksi yang disepakati agar kedisiplinan tetap terjaga.



Gambar 22. Perkembangan Forum Masyarakat Code Utara (FMCU).

FMCU berkembang karena adanya kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dapat dimanfaatkan setiap harinya. FMCU juga telah menjadi lembaga yang menjadi wadah bersama masyarakat

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya persoalan lingkungan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan lembaga Usaha Air Tirta Kencana dalam menghadapi persoalan masyarakat yang beragam tidak saja persoalan air. Terbentuknya FMCU tidak lepas dari keberadaan Usaha Air Tirta Kencana sebelumnya yang telah mampu mengelola sumber daya air untuk masyarakat sehingga muncul kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan.

FMCU yang memiliki visi untuk mengembangkan Sungai Code sebagai kawasan wisata berusaha memperbaiki lingkungan. Merti Code tidak berdiri sendiri tetapi tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan dua lembaga ini. Merti Code sebagai pendekatan budaya muncul karena secara sadar para pengurus FMCU menggali semua ingatan dan pengalaman bersama di masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan juga tentang budaya yang dulu pernah ada di Sungai Code.

4.4. Budaya Merti Code

Sebelum ada kegiatan budaya Merti Code, pada tahun 1950-an masyarakat Sempadan Sungai Code memiliki kegiatan *Ruwatan Bumi* setiap tanggal satu Suro penanggalan Jawa. *Ruwatan Bumi* merupakan bentuk tirakatan dengan menggelar pertunjukan wayang. Tujuan tirakatan untuk menghindari wabah penyakit dan bencana alam seperti banjir lahar dingin yang selalu mengancam permukiman di Sempadan Sungai Code. Kegiatan berupa perkumpulan warga di pinggir sungai untuk menghormati sungai dan mengucapkan terima kasih atas berkah yang diberikan Tuhan berupa keberadaan Sungai Code tersebut. Bagi sebagian masyarakat upacara ini dikenal sebagai *kendurenan* atau kenduri.

Pada acara kenduri, selain terdapat acara makan bersama juga terdapat sesaji yang merupakan sarana pengantar doa manusia kepada penciptanya. Sesaji adalah satu bentuk materi yang dipakai sebagai sarana simbolis untuk mengucapkan terima kasih dan memohon keselamatan dari berbagai bencana. Di dalam sesaji terdapat beberapa perangkat seperti bunga, kemenyan dan rokok kretek. Sesaji diletakkan di pinggir

sungai dan dibiarkan selama beberapa hari. Tidak seorang pun berani mengusik atau merusak sesaji tersebut.

Pada tahun 1950 salah seorang anggota *konstituante* menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Sempadan Sungai Code. Kegiatan ini melibatkan lebih banyak komponen masyarakat. Kegiatan ini dinamakan *Tablo* yaitu kegiatan untuk mengenang dan merasakan kembali keberadaan Sungai Code bagi masyarakat Kampung Jetisharjo. Kegiatan ini berbentuk seperti pementasan drama atau sandiwara dihadapan masyarakat. Saat itu Sungai Code masih mempunyai makna mistis yang kuat terutama berhubungan dengan Gunung Merapi.

Kegiatan di Sempadan Sungai Code muncul karena kuatnya kegiatan budaya yang banyak dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai-partai tersebut memiliki perangkat propaganda yang berupa penggalakan kegiatan budaya pada masyarakat. Kawasan Code Utara dan sekitarnya pada waktu itu menjadi daerah basis massa PKI dan PNI. Kegiatan budaya ini semakin beragam bentuknya sejak Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) masuk dalam komunitas di Kawasan Code Utara. Pagelaran berupa wayang kulit dan tari-tarian rakyat banyak diselenggarakan.

Penangkapan tokoh masyarakat dan seniman di Kampung Jetisharjo dan sekitarnya di akhir tahun 1960 tidak saja mematikan kegiatan masyarakat di bidang budaya dan penghormatan terhadap sungai. Masyarakat juga dihinggapi oleh ketakutan akan ikut ditangkap karena dianggap terlibat organisasi terlarang. Kegiatan-kegiatan berkumpul selama masa Orde Baru hampir dikatakan tidak ada lagi bahkan ruwatan bumi yang selalu dilakukan pada bulan Suro hilang.

Merti Code muncul setelah lama masyarakat tidak memiliki kegiatan budaya tetapi kegiatan ini lebih dikaitkan dengan persoalan lingkungan hidup dan wisata budaya. Selain kegiatan budaya, dilakukan juga kegiatan bersih Sungai Code. Kegiatan ini

digelar dengan meriah selama hampir satu bulan dengan berbagai acara di sepanjang sempadan Sungai Code. Pertama kali dilakukan di tahun 2001 *Merti Code* memang hanya Kampung Jetisharjo dan Kampung Terban.

Pada tahun 2003 pihak Keraton Yogyakarta mengakui kegiatan *Merti Code* ini sebagai salah satu kegiatan budaya yang hidup di masyarakat. Pengakuan ditandai dengan memberikan tombak Kyai Ranumurti yang berasal dari kesatuan perajurit *Patangpuluhan* sebagai silaturahmi pihak keraton kepada rakyatnya dan juga restu untuk melaksanakan kegiatan *Merti Code*. Tahun ini juga jumlah kampung yang terlibat dalam *Merti Code* juga telah meluas seperti Kampung Pogung, Sendowo, Blunyah, Karangjari dan Gemawang yang berada di Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan *Merti Code* paling besar dilaksanakan pada tahun 2005 yang berjalan hampir satu bulan dengan berbagai kegiatan seperti pasar malam sampai kegiatan mengubah sungai menjadi arena pancing dan lomba-lomba di atas sungai.

Pada tahun 2006 kegiatan *Merti Code* tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama sebagian wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta tertimpa bencana gempa bumi yang cukup parah tepatnya bulan Mei 2006, dimana imbasnya masih dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kawasan Kampung Jetisharjo juga terkena gempa yang cukup hebat. Beberapa rumah rusak berat walaupun tidak ada korban jiwa. Acara *Merti Code* kemudian dilaksanakan dalam suasana keprihatinan.

Pada kegiatan budaya *Merti Code* terdapat ritual *Tuk Pitu* yang berupa pengambilan air di tujuh lokasi sumber mata air yang terdapat di sepanjang Sungai Code. *Pitu* berarti angka tujuh tetapi juga diartikan sebagai *pitulungan* yaitu mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ritual ini dilaksanakan pada sore hari di tujuh lokasi mata air yang sudah disepakati bersama, terutama daerah yang ikut berpartisipasi dalam acara *Merti Code*. Proses pengambilan air dilakukan oleh Slamet Karsodiharjo yang lebih dikenal sebagai “*Mbah Delik*” yang juga menjadi pegawai Keraton Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena Slamet sangat memahami ritual budaya Jawa yang biasa

dilakukan di Keraton Yogyakarta. Pengetahuan ini dipakai untuk melakukan proses pengambilan mata air.

Pengambilan air dipersiapkan oleh beberapa warga dengan membuat perangkat upacara adat dengan memasang “kembar mayang”. Kembar mayang yang berupa anyaman janur kuning yang biasa digunakan dalam perlengkapan upacara perkawinan adat Jawa. Hal ini dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap mata air yang selama ini telah menyediakan air bersih bagi mereka. Proses ini dilakukan karena air ini akan dipertemukan dengan air dari tujuh sumber mata air seperti layaknya sebuah perkawinan. Kembar mayang adalah penjelmaan dari dua dewa cinta yaitu Batara Kamajaya dan istrinya Batari Ratih. Hal ini dikaitkan dengan sumber mata air pemakaian kembar mayang pada saat pengambilan air adalah pemaknaan bahwa sumber air adalah sesuatu yang suci dan sakral. Manusia harus mencintai sumber air tersebut karena merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan diperlihara agar terus dapat memberikan manfaat bagi manusia di sekitarnya.



Gambar 23. Sakralisasi mata air dalam Proses “Merti Code” tahun 2007

Ada beberapa tahap dalam ritual pengambilan air ini. Tahap pertama diawali dengan pemasangan kembar mayang di lokasi mata air. Setelah itu sekelompok orang yang dituakan diberi tanggungjawab untuk mengambil air dari mata air. Para tetua diiringi oleh para gadis pembawa tempayan kecil yang terbuat dari tanah liat. Tahap Kedua adalah pengambilan air oleh Mbah Delik dengan “*siwur*” yaitu gayung yang terbuat dari tempurung kelapa. Dimulai dengan pembacaan doa secara Islam oleh ketua panitia *Merti Code*, dilanjutkan dengan penghormatan kepada sumber mata air disertai pembacaan doa sambil memasukan air dalam tempayan tanah liat (gambar 23).

Sumber-sumber mata air ini memiliki nilai penting karena merupakan sumber mata air alami yang masih cukup besar. Sakralisasi sumber mata air yang dilakukan oleh orang yang dituakan di lingkungan tersebut diharapkan oleh tokoh masyarakat setempat dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan sumber mata air tersebut. Orang Tua Jawa secara ritual dan moral lebih tinggi dan unggul daripada anak-anak atau yang lebih muda. Orang yang lebih muda harus menghormati dan mendengar orang yang lebih tua (Geertz, 1982). Air yang telah melalui ritual oleh orang tua akan memiliki nilai lebih dari air biasa.

Air yang telah diambil beserta “*siwur*”(gayung) kemudian diarak di Kota Yogyakarta pada pagelaran budaya keesokan harinya. “*Siwur*” yang telah dipakai ini bernama Kyai Tri Murti yang berarti tiga kejayaan. Tiga kejayaan yang dimaksud adalah karena benda ini telah menjadi saksi sejarah terhadap tiga Raja Yogyakarta terakhir. Benda ini adalah pemberian Sultan Hamengkubuwono VIII dan telah menjadi alat “*siraman*” bagi prosesi pelantikan Sultan Hamengkubuwono IX dan Hamengkubowono X.

Ritual berikutnya adalah ritual ruwatan. Pada acara “*ruwatan*”, tujuh tempayan yang berisi air dari tujuh mata air tersebut dibawa oleh tujuh orang pemuda untuk diserahkan kepada sesepuh kampung. Air yang berada di dalamnya dituangkan menjadi satu dalam sebuah gentong besar atau disebut “*ancak patirtan*”. Tidak semua orang bisa menjadi pembawa air. Pembawa air harus seorang perempuan yang masih perawan dengan

harapan air yang dibawa merupakan air yang masih bebas dari segala macam bentuk polusi dan pencemaran. Hal ini melambangkan bahwa air harus dibawa oleh orang yang masih suci dan bersih dari segala hal yang buruk. Air harus diperlakukan sama supaya tidak mengalami pencemaran oleh manusia. Orang yang menuangkan air ke dalam bejana yang lebih besar juga dipilih dari tetua masyarakat dengan harapan akan mewakili kebijaksanaan para orang tua yang dapat menjadi contoh bagi generasi muda (Gambar 22).



Gambar 24. Ritual penghormatan mata air Sungai Code tahun 2007

Acara ruwatan pada *Merti Code* tahun 2007 dilakukan di lapangan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 yang tidak jauh dari sempadan sungai. Acara diteruskan dengan menggelar pertunjukan wayang kulit dengan judul “*Banyu Suci Perwitosari*” oleh Dalang Ki Edi Suwondo. Cerita dalam pertunjukan ini tentang pertemuan antara Werkudoro dengan Dewaruci. Werkudoro adalah salah satu tokoh pendawa lima, yang dikenal sebagai Bima dalam versi cerita Mahabarata. Werkudoro mempunyai watak keras, selalu bicara apa adanya dan tidak pandai berdiplomasi. Dia akan selalu

mempertahankan kebenaran yang diyakininya sampai mati. Dewaruci adalah tokoh yang melambangkan pemahaman dan sumber pengetahuan

Pada kisah ini diceritakan pengembaraan Werkudoro dalam mencari Air “*Perwitosari*”, yang melambangkan inti pemahaman manusia terhadap air yang suci. Pengembaraan dimulai dari Hutan Tikbrasara dan Gunung Reksomuko. Hutan Tikbrasara melambangkan kepedulian dan keprihatian, sedangkan Gunung Reksomuko berasal dari kata “*rekso*” yang artinya berjaga-jaga dan “*muko*” yang artinya muka atau wajah. Bagian ini dapat diartikan dengan pengembaraan Werkudoro di dalam melakukan kontemplasi untuk menajamkan perasaan.

Werkudoro menyadari bahwa air suci yang tidak mudah untuk ditemukan berada di dasar lautan. Tanpa keraguan Werkudoro menuju laut selatan dan bertemu dengan Dewaruci. Bentuk wayang Dewaruci lebih kecil dibandingkan dengan karakter wayang laki-laki yang lain. Dewaruci hanya digambarkan sebesar tokoh wayang perempuan. Dewaruci meminta Werkudoro yang berbadan lebih besar masuk ke badannya melalui telinga sebelah kiri. Di dalam tubuh Dewaruci, Werkudoro dapat melihat dengan jelas seluruh alam semesta. Proses ini sebetulnya menceritakan tentang proses mengheningkan cipta untuk dapat melihat hakekat tentang hidup yang sebenarnya dengan cara melakukan proses meditasi. Werkudoro mengalami peristiwa “*manunggaling kawulo gusti*” yaitu proses bertemunya antara umat manusia dengan Penciptanya, pemahaman tentang hidup dan mati. Werkudoro menemukan kebahagiaan sejati yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pada pencarian air suci ini yaitu hakekat dari ilmu pengetahuan.

Ki Dalang Ki Edi Suwondo juga menceritakan tentang hubungan dengan Gunung Reksomuka. Pada dunia nyata Gunung Reksomuka diwujudkan dengan Gunung Merapi yang berhubungan langsung dengan Pantai Selatan melalui Sungai Code. Pantai Selatan adalah tempat yang sakral bagi Masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta karena merupakan tempat tinggal Ratu Kidul. Dikisahkan pasukan jin dari Gunung Merapi

turun untuk mengunjungi Ratu Kidul melewati Sungai Code. Masyarakat Yogyakarta percaya bahwa ketika pasukan jin ini lewat maka dibelakang rombongan pasukan ini akan ada air bah berupa lahar dingin dari Gunung Merapi. Peristiwa ini dikenal oleh masyarakat sebagai “*Lampor*”. Cerita ini mencoba membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai sungai karena air merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Walaupun demikian sungai bisa menimbulkan mara bahaya apabila tidak dijaga dengan baik.

Dalang dalam “*ruwatan*” ini bertugas untuk untuk membuang semua hal-hal yang diyakini memiliki sisi negatif dari sungai. Oleh karena itu dalang juga berdoa memohon perlindungan agar Sungai Code selalu memberikan manfaat. Pertunjukkan wayang akan berlangsung sampai pagi hari sementara “*Ancak Patirtan*” atau bejana besar yang berisi air akan diletakkan di depan panggung wayang kulit sampai pagi hari.

Pada pagi harinya semua masyarakat yang terlibat dalam kirab sudah sibuk untuk mempersiapkan semua peralatan dalam Kirab sesuai dengan seragam yang mewakili daerah masing-masing. Seragam-seragam ini mereka usahakan sendiri tanpa mengharapakan bantuan dari pemerintah.

“*Ancak patirtan*” kemudian diarak bersama-sama dengan pusaka tombak Kyai Ranumurti, gunung boga (yang terbuat dari sayur mayur, buah-buahan dan jajan pasar), diiring oleh kelompok-kelompok masyarakat (kelompok prajurit, kelompok lansia, pramuka) serta kelompok seni (Sanggar Tari Natya Laksita Didik Nini Thowok, kelompok Musik Bambu Blimbingsari, Uran-uran Terban, Putra Bali).

Salah satu kelompok utama dalam kirab tersebut adalah “*bergodo*” yaitu pasukan dari Keraton Yogyakarta. Nama kesatuan pasukan diambil dari nama masing-masing kampung Pasukan yang mengikuti kegiatan ini adalah berasal dari Kampung Gondolayu, Kampung Cokrokusuman, Kampung Jetisharjo, Kampung Jetis Pasiraman, Kampung Blimbingsari, Kampung Karangjati, dan Kampung Terban.



Gambar 25. *Kirab Merti Code* 2007 melewati salah satu simbol penting kota yaitu Tugu Pal Putih.

Acara di lapangan diikuti dengan pengalungan rangkaian bunga melati pada Tombak Kyai Ranumurti. Pada tahun 2006 pengalungan rangkaian bunga melati ini dilakukan oleh Walikota Yogyakarta. Merti Code kali ini Bupati Sleman diminta untuk melepas rombongan kirab sebagai simbol kerjasama antar kedua masyarakat, yaitu Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Perjalanan rombongan melalui Tugu yang merupakan simbol *Manunggaling Kawulo Gusti* yaitu bersatunya antara raja dengan rakyatnya (Gamber 23).. *Ancak Patirtan* dan beberapa *gunungan* dibawa dengan mobil terbuka karena terlalu berat untuk ditandu oleh masyarakat disamping jarak Kirab yang ditempuh semakin jauh.

Gunungan yang berisi makanan serta air yang berasal dari 7 sumber mata air kemudian diperebutkan masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Air dari 7 mata air

diperebutkan lebih dahulu sebelum *gunungan*” yang terdiri dari buah-buahan dan jajanan pasar. Sebagian ada yang meminumnya langsung karena meyakini bahwa air ini bersih dan memiliki kekuatan. Selain itu air ini diambil dari 7 mata air yang melalui upacara serta doa untuk membersihkannya. Sementara kaum perempuan yang mendapatkan air bahwa memasak makanan dengan air tersebut dianggap mempunyai kekuatan melancarkan rejeki selain rasanya lebih nikmat.

Wajah Mbah Sastrosudirjo (80), salah seorang yang berebut dalam acara ini terlihat cerah. Di tangan kanannya tergegang plastik bening bersisi air. Sementara itu di tangan kirinya memegang beberapa helai kacang panjang, dua potong wortel dan selonjor cabe merah besar. “Air ini akan saya minum dan sayur-sayuran ini akan saya masak. Saya percaya akan ada rezeki dan badan selalu sehat berkat air ini. Air ini kan diberkahi Sultan pasti akan mendatangkan hal yang baik” ujar warga yang tinggal di Terban ini (Kompas, 2007). Kejadian serupa dialami oleh kaum muda yang ikut berebut.

Totok Pratopo sebagai tokoh masyarakat yang sejak tahun 2001 terlibat “*Merti Code*” melihat usaha ini memiliki arti penting dalam mendorong kesadaran bersama di dalam masyarakat untuk dapat memelihara sungai. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan sebagai berikut (rekaman peneliti pada Pidato Totok di Universitas Gadjah Mada):

“*Merti Code* adalah sebuah kegiatan budaya yang muncul dari masyarakat yang selama ini dianggap sebagai masyarakat kumuh dan miskin dan tidak mampu mengelola lingkungannya. Di sisi lain punya potensi luar biasa. Kita ingin unggul dulu, kita tampilkan dulu bahwa Orang Code itu punya potensi yaitu potensi seni budayanya, potensi mengelola sumberdaya air, baru kita kelola secara bersama. Maka kalau hanya melihat persoalan sampahnya kekumuhannya maka tidak akan ada orang yang sanggup untuk bangkit dari persoalan ini. Dengan *Merti Code* masyarakat dapat bergembira ria, berpuisi, *bermacapatan* (puisi yang dilagukan dalam bahasa Jawa), dengan bersama-sama *seneng*

rayahan (senang berebut makanan dari gunung yang dibawa dalam arak2an Merti Code). Maka kita dapat berkumpul bersama dan memaknai bersama.

Harapannya Merti code tidak hanya *even* kita, tetapi menjadi semangat sehari-hari, jadi tidak hanya setahun sekali. Jadi setiap Warga Code dan warga lainnya mempunyai sifat *memetri* (merawat) sungai. Kalau tahu sungai kotor ya “*risi*” terus bersikap kalau ada orang yang menyetrum terus “*dibandemi*”(dilempari),. Dan itu menjadi semangat, menjadi sikap hidup *orang pinggir kali* (masyarakat sempadan sungai) untuk memiliki jiwa *memetri* yang selama ini hilang” (rekaman pidato Ketua Panitia Merti Code).

Kegiatan *Merti Code* ini sangat bermanfaat untuk dapat mengajak masyarakat yang memanfaatkan sumber mata air itu untuk bergotong royong membersihkan sampah terutama di sekitar sumber mata air. Setelah kegiatan Merti Code sumber mata air tersebut juga relatif bersih.

Merti Code sebagai kegiatan masyarakat merupakan proses adaptasi dan proses pemaknaan dari kebudayaan yang dominan yaitu Budaya Jawa. *Merti Code* merupakan kegiatan yang mirip dengan *Merti Deso* dengan perlambang Dewi Sri yaitu dewi kesuburan pada masyarakat petani. Penghormatan kepada Dewi Sri adalah penghormatan kepada sumberdaya alam untuk kelimpahan hasil panen padi pada tiap musim tanam. Berbagai upacara dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar terus menghormati semua sumberdaya alam tersebut. Penghormatan terhadap Dewi Sri sebagai sumber kelimpahan pangan ini dipakai oleh para tokoh penggagas *Merti Code* untuk mengajak masyarakat menghormati dan merawat Sungai Code.

Merti Deso merupakan salah satu acuan yang paling dekat dengan situasi mereka dan menempatkan merti deso ini sebagai pola ideal untuk melakukan kegiatan yang sama untuk mempertahankan lingkungan agar tetap dapat berfungsi menopang kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dalam bersih desa adalah peggormatan terhadap simbol-simbol kesuburan dan padi seperti Dewi Sri, maka dalam masyarakat sempadan sungai, air merupakan simbol penting yang harus dipertahankan. Pengambilan air dari tujuh

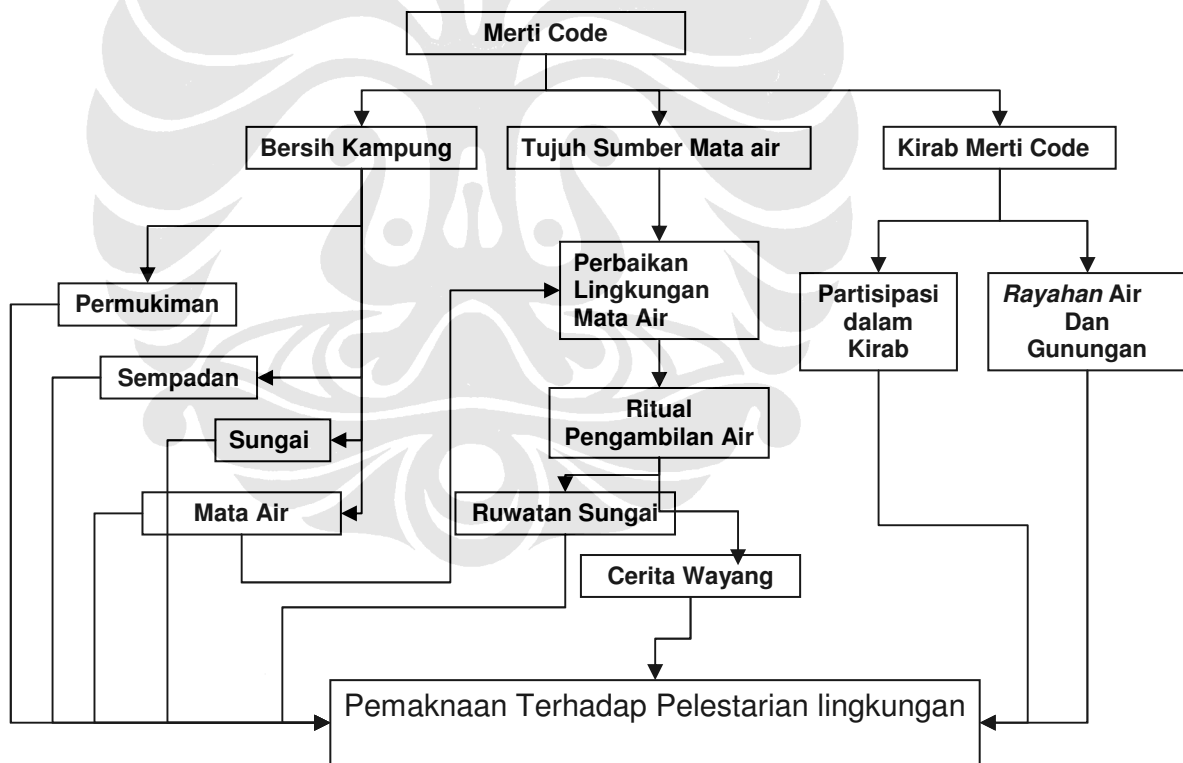
mata air merupakan usaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya air bagi kehidupan dan menjaga mata air.

Masyarakat diposisikan untuk memaknai air yang telah melalui berbagai tahapan tersebut merupakan air yang mempunyai makna ganda yaitu sebagai air yang bersih karena berasal dari mata air yang terpilih dan juga air yang mempunyai arti sebagai air yang dapat mendatangkan keberuntungan dan hal-hal baik lainnya sehingga selalu diperebutkan oleh masyarakat selain gunung yang berisi berbagai jajanan pasar dan sayur-sayuran. Pengaruh budaya Keraton Yogyakarta dengan berbagai nilai-nilai magis yang masih besar menjadi salah satu daya tarik dan penggerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tahap pengambilan air dalam kegiatan inipun dicarikan seorang pegawai Keraton Yogyakarta yang memiliki pengalaman panjang dalam hal melakukan berbagai upacara adat Jawa. Sementara itu pakaian adat Jawa terutama seragam perajurit keraton menjadi wajah utama dalam *Kirab Merti Code*. Gunung yang diperebutkan warga merupakan tiruan dari ritual *sekaten* yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta pada bulan *Suro*.



Gambar 26. Gotong Royong membersihkan Sungai Code.

Kegiatan *Merti Code* yang telah berjalan selama ini juga berfungsi untuk menyatukan semua kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, partai politik, profesi, serta kedudukan dan peran sosial masing-masing. Kegiatan pengelolaan Sungai Code yang biasanya terbagi secara tidak langsung karena titik pertemuan yang berbeda antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain seperti pemeluk agama Islam membicarakan masalah lingkungan di Masjid pemeluk agama Kristen Katolik di Gereja, begitu pula para kader partai politik di pertemuan kader masing-masing partai. *Merti Code* memiliki fungsi yang sangat tinggi untuk memaknai kembali pelestarian sungai yang selama ini sudah mulai dilupakan masyarakat. Sebagai kegiatan Budaya *Merti Code* tidak berada pada kegiatan-kegiatan yang bersifat *ceremonial* saja, tetapi juga kegiatan membersihkan lingkungan sungai (Gambar 26).



Gambar 27. Pendekatan Budaya Merti Code dalam makna pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Merti Code memiliki tiga tahap penting yang masing-masing memiliki makna tersendiri bagi masyarakat (Gambar 27). Tahap pertama adalah bersih sungai dan kampung dengan gotong royong semua anggota masyarakat untuk membersihkan lingkungan permukiman, mata air dan sungai; Tahap Kedua adalah pengambilan tujuh sumber mata air yang bermakna penting bagi masyarakat untuk melestarikan sumber mata air di Sungai Code. Tahap ini diikuti ruwatan air sungai Code yang bermaksud untuk berdoa bagi keselamatan manusia yang tinggal di sempadan sungai agar tetap mendapat manfaat dan terhindar dari segala potensi bahaya yang datang dari Sungai Code seperti banjir. Setelah Ruwatan acara dirangkai dengan pertunjukan wayang kulit tentang makna air dalam kisah pewayangan. Tahap ketiga adalah kirab Merti Code yang menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat sempadan sungai dan juga memperebutkan air dan gunung Boga dan makanan yang menjadi sumber kemakmuran Sungai Code.

Bersih kampung yang merupakan kegiatan awal yang berfungsi sebagai sarana untuk menarik partisipasi masyarakat untuk membersihkan lingkungannya sendiri sendiri. Kegiatan selanjutnya diarahkan kepada sarana umum dan ruang-ruang bersama seperti sempadan, sungai beserta mata airnya. Kegiatan ini tidak secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memaknai kembali arti sungai Code dalam kehidupan mereka. Proses bersih kampung merupakan tindakan langsung dari makna sungai yang penting untuk kehidupan dan kemakmuran selama ini. Menjaga kebersihan lingkungan sungai permukiman dan sekitarnya akan mendekatkan masyarakat terhadap makna-makna pelestarian dan pemeliharaan terhadap lingkungan.

Proses pengambilan sumber mata air selalu diikuti dengan perbaikan bak mata air dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih bersih dan rapi bersama dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Ritual pengambilan air di tujuh mata air selain untuk memberikan makna yang lebih tinggi dari hari-hari biasanya juga melibatkan generasi muda dan masyarakat sekitar sehingga fungsi mata air sebagai sumber mata air juga dimaknai lebih tinggi dari air biasa. Sakralisasi sumber mata air tidak dimaksudkan untuk memberikan ketakutan baru kepada masyarakat Kegiatan ini untuk meninggikan

posisi air di mata masyarakat dan memberikan rasa hormat dan memelihara sumber air untuk terus dapat berfungsi sebagai penyedia air bersih melalui upacara *ruwatan* dan pementasan wayang kulit.

Kirab adalah kegiatan terakhir dari *Merti Code* yang bermaksud membawa air yang telah disucikan beserta gunung untuk dibagikan kepada masyarakat luas. Pasukan pengawal yang membawa air dan gunung merupakan partisipasi masyarakat sempadan sungai disertai kelompok-kelompok kesenian yang ada di Yogyakarta untuk ikut meramaikan kegiatan. *Rayahan* adalah simbol dari rasa syukur masyarakat sempadan Sungai Code dengan memperebutkan air dan *gunungan boga* sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat tidak saja memperebutkan hasil bumi yang ada di gunung tetapi air yang telah melalui berbagai proses ritual juga memiliki arti yang lebih tinggi bagi masyarakat. Nilai ini memberikan rasa hormat terhadap air dari Sungai Code untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam pemeliharaan sungai.

Masyarakat sempada Sungai Code Utara merupakan permukiman yang cukup padat yang menyebabkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan cukup tinggi. Persoalan yang cukup dominan di kalangan masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta masih banyaknya pengangguran atau pekerja sektor informal yang sangat rentan dengan kehilangan pekerjaan. Persoalan lingkungan yang selama ini menjadi hambatan masyarakat adalah sulitnya pelayanan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang bisa mencapai masyarakat di sempadan sungai. Hal ini terjadi karena kondisi geografis yang curam sehingga banyak jalan-jalan yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan tidak memungkinkan pengangkut sampah masuk di wilayah permukiman di sempadan sungai.

Sungai Code sejak lama telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di sempadannya. Fungsi sungai sebagai penopang kehidupan masyarakat seperti

ketersediaan air di *belik* atau mata air serta lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran serta manfaat lainnya telah memunculkan keterikatan masyarakat dengan sungai. Sungai tidak saja berfungsi secara ekonomi tetapi juga menjadi ruang sosial bagi masyarakat untuk bertemu dan membicarakan persoalan sehari-hari. Secara turun temurun masyarakat telah mengembangkan strategi untuk menyalasi berbagai kesulitan dalam hidupnya (Beckmann, 1988).

Kepadatan permukiman yang makin tinggi di sempadan sungai karena adanya penambahan penduduk baik dari dalam maupun karena banyaknya pendatang yang bermukim telah banyak merubah kondisi fisik sungai dan bantarannya. Lahan-lahan pertanian dan juga lahan tanaman keras terutama pohon bambu terdesak oleh permukiman warga. Perubahan yang juga berpengaruh adalah pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor-sektor lain di perkotaan Yogyakarta yang terus berkembang. Perubahan ini berpengaruh pula pada pola hubungan antar masyarakat dan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam praktek gotong-royong dan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya air secara bersama. Pembangunan talud yang bertujuan untuk menahan banjir dan melindungi masyarakat di sempadan dari bahaya banjir memberikan pengaruh terhadap hubungan masyarakat dengan sungai.

Bangunan talud telah menghilangkan sebagian besar lahan-lahan tanaman sayur yang tersisa di tepi sungai yang semakin mengecil. Lingkungan alami yang tadinya dipakai telah berubah menjadi lingkungan buatan yang tidak menyisakan lagi ruang di tepi sungai untuk penanaman berbagai tanaman semusim seperti sayur-sayuran. Selain hilangnya fungsi pertanian di kawasan ini beberapa fungsi lain juga hilang karena perubahan fisik sungai seperti fungsi rekreasi dan tempat mencari ikan. Saat ini kondisi sungai yang semakin sempit dan tidak banyak ruang yang cukup dalam dan tenang telah menghilangkan ikan-ikan yang selama ini berkembang biak. Kegiatan masyarakat untuk mencari ikan di sungai sudah tidak bisa lagi dilakukan baik untuk kepentingan rekreasi maupun dalam skala ekonomi.

Masyarakat sempadan Sungai Code sempat mengalami keterputusan ikatan dengan sungai akibat pembangunan talud yang menyulitkan warga untuk memanfaatkan sungai terutama fungsi ketersediaan air. Beberapa mata air masih mengeluarkan air yang sangat jernih terutama di sisi timur sungai sehingga masyarakat harus membuat tanggata-tangga dari kayu atau bambu dan menyeberangi sungai untuk mendapatkan air bersih. Persoalan sampah juga mengalami masa yang paling buruk ketika masyarakat cenderung membuang sampah bibir talud karena masih menjadi ruang kosong yang memungkinkan sampah dibuang ke sungai apabila arus air sedang besar.

Kesulitan masyarakat untuk penyediaan air bersih telah mendorong masyarakat mengembangkan berbagai cara untuk menarik air dari sungai yang letaknya semakin dalam karena bangunan talud. Penarikan untuk memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan air dari mata air yang ada di bibir sungai Code lebih dekat ke kawasan permukiman atau bahkan langsung bisa dimanfaatkan di kamar mandi umum maupun di rumah-rumah penduduk. Program-program pemerintah baik langsung maupun tidak langsung dan juga dari perguruan tinggi telah sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan air yang dinamakan Usaha Air Tirta Kencana. Pengelolaan air bersama ini telah menjadi salah satu peristiwa penting yang merangkaikan kembali ingatan masyarakat terhadap makna sungai yang selama ini telah banyak dilupakan oleh masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya alam secara bersama dan dengan membangun mekanisme dan aturan yang diterapkan dan disepakati bersama oleh masyarakat telah memberikan kesadaran perlunya membangun satu kelembagaan. Kelembagaan masyarakat ini dimaksudkan untuk membahas persoalan dan memecahkan masalah-masalah yang lebih besar daripada pengelolaan air yang telah dilakukan oleh Tirta Kencana. Forum Masyarakat Code Utara (FMCU) merupakan lembaga yang terbentuk karena berbagai faktor baik yang berasal dari dalam masyarakat maupun yang berasal dari luar. Program-program dari luar yang mendorong pembentukan lembaga masyarakat yang

kuat bertemu dengan keinginan masyarakat untuk keluar dari masalah-masalah lingkungan yang dihadapi sehari-hari. Modal sosial utama masyarakat untuk membangun kelembagaan masyarakat adalah keberhasilan mereka membangun lembaga Tirta Kencana yang memberikan bukti dan kepercayaan diri masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dono:

Tirta Kencana dan FMCU itu seperti anak kembar tetapi kenapa kami membutuhkan lebih dari sekedar lembaga pengelola air. Hal ini karena saat itu persoalan warga tidak hanya karena air saja tetapi juga karena persoalan lingkungan seperti sampah dan juga pencemaran sungai terutama dari Rumah sakit Sardjito. Pada saat-saat tertentu kami sering terserang *gatelen* (gatal-gatal) mungkin karena sampah obat-obatan dari rumah sakit yang terbawa arus sungai ke kawasan kami terutama ketika mencemari *belik* (mata air) kami. Untuk mewakili persoalan-persoalan dan juga untuk menjadi panutan, tuntunan dan acuan bagi masyarakat maka FMCU sangat penting artinya bagi kami untuk bergerak maju.

Sistem dan mekanisme yang berkembang di masyarakat ini tentu saja tidak bersifat otomatis atau sesuatu yang pasti terjadi dalam mengatasi persoalan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lembaga tradisional yang menjaga keseimbangan lingkungan telah mengalami perubahan dengan banyaknya pendatang yang bermukim di sempadan. Lembaga-lembaga tradisional telah kehilangan perannya akibat proses perubahan yang terjadi di masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Perubahan-perubahan ini menyebabkan masyarakat menggantungkan pemecahan masalah dengan lembaga kekerabatan yang masih ada dan juga ketetanggaan, pertemanan dan kesamaan jenis pekerjaan dan lain-lain.

Perkembangan lembaga Tirta Kencana dan FMCU tidak muncul dari kondisi yang selaras, serasi dan harmonis terhadap lingkungan tapi karena persoalan-persoalan lingkungan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Merti Code adalah siasat budaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran bersama di dalam masyarakat sempadan sungai yang selama ini memanfaatkan sungai terutama air bersih yang dihasilkan oleh Sungai Code. Merti Code adalah ritual untuk memahami gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Simbol-simbol dan *metafor* yang digunakan akan

memberikan gambaran pemahaman masyarakat terhadap persoalan-persoalan sungai yang dihadapi saat ini.

Merti Code dengan tiga tahap kegiatan yang semuanya bertujuan untuk mengumpulkan banyak orang dan melakukan sesuatu hal secara bersama-sama. Konsep gotong royong yang selama ini telah memudar dibangun kembali melalui berbagai kegiatan membersihkan lingkungan permukiman sampai kepada sampah-sampah yang ada di badan sungai. Gotong royong digunakan untuk membangun kembali kesadaran pentingnya kebersamaan dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Gotong royong juga bisa menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang berada di luar wilayah pribadi dan berada di wilayah umum seperti jalan, sempadan sungai dan juga sungai beserta mata airnya.

Kegiatan berikutnya banyak membangun pemaknaan tentang air kepada masyarakat luas baik kepada masyarakat yang melihat *Merti Code* maupun masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan *Merti Code*. Penghormatan terhadap air merupakan ritual penting yang dilakukan didalam kegiatan ini. Air yang berasal dari tujuh sumber mata air merupakan upaya untuk meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan membangun kesadaran bersama pentingnya menjaga kelestarian sungai dan keberlangsungan sumber-sumber mata air untuk terus memberikan kehidupan bagi masyarakat di sempadan sungai.

